

## Dari Redaksi

Salam Pembaca.

Buletin Dinamika Kota kali ini merupakan edisi khusus dalam rangka menyambut pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia Komisariat Wilayah IV (APEKSI Komwil IV), yang meliputi wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, yang pada tahun 2012 ini diselenggarakan di Kota Bima.

Jika biasanya Buletin Dinamika Kota menyajikan laporan berita kegiatan dan perkembangan daerah selama satu bulan, maka edisi ini memuat profil Kota Bima, mulai dari sejarah terbentuknya Kota Bima, gambaran umum wilayah, berbagai program pembangunan infrastruktur, pariwisata dan kebudayaan khas daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, analisis isu dan strategi pembangunan Kota Bima, hingga Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Bima (RTRW Kota Bima Tahun 2011 – 2031).

Semua ini dimaksudkan agar para peserta Rakor APEKSI Komwil IV dapat mengenal Kota Bima lebih dekat.

Demikian pengantar singkat kami. Semoga buletin ini dapat menjadi bacaan yang menarik dan memberikan informasi yang bermanfaat.

Selamat membaca.

**Daftar Isi**  
**Edisi Khusus Buletin Dinamika Kota (Oktober, November, Desember)**  
**68 halaman**

<b>No.</b>	<b>Topik</b>
1.	Sejarah Terbentuknya Kota Bima
2.	Gambaran Umum Wilayah Kota Bima
3.	Berbagai Program Pembangunan Infrastruktur
4.	Pariwisata dan Kebudayaan Khas Daerah Kota Bima
5.	Mewujudkan Kebersihan dan Keindahan Kota (Kota Sehat, Program 1000 Taman, dan Lomba Kelurahan)
6.	Ikhtisar <i>Pilot Project</i> Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bima
7.	Analisis Isu dan Strategi Pembangunan Kota Bima
8.	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Bima (RTRW Kota Bima Tahun 2011 – 2031)
9.	Profil Walikota Bima
10.	Profil Wakil Walikota
11.	Profil Sekda
12.	Profil Pimpinan DPRD (3 orang)
13.	PKK Kota Bima (Dua Tahun Kepemimpinan Hj. Yani Marlina)
14.	Profil 12 Daerah Anggota APEKSI Komwil IV

## Sejarah Terbentuknya Kota Bima

Kota Bima yang awalnya merupakan kota administrasi Bima, terbentuk pada tanggal 10 April 2002 melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Kota Bima Nomor 13 Tahun 2002. Terdapat berbagai pertimbangan yang mendasari pembentukan Kota Bima yang merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Kota Bima. Pertimbangan-pertimbangan tersebut pada dasarnya terkait dengan pertimbangan politis dan pertimbangan pengembangan ekonomi dan pembangunan regional dalam rangka mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditinjau dari pertimbangan politis, terdapat dua opsi yang harus dipilih oleh Pemerintah Kota Administratif Bima sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada saat itu. Opsi yang pertama adalah Pemerintah Kota Administratif Bima harus menjadi kota yang otonom, sedangkan opsi kedua adalah dihapuskannya status kota administratif jika Bima tidak memenuhi ketentuan untuk ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom.

Memilih opsi yang kedua berarti melupakan sejarah panjang tujuh belas tahun menuju pembentukan Kota Administratif Bima. Oleh karenanya, masyarakat dan Pemerintah Kota Administrasi Bima harus mempersiapkan proses peningkatan statusnya menjadi daerah kota yang otonom, apalagi batas waktu proses peningkatan status ini pada saat itu hanya sampai bulan Mei 2001.

Melalui serangkaian proses penilaian oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, akhirnya, pada tanggal 10 April 2002 Undang-Undang Tentang Pembentukan Kota Bima Nomor 13 Tahun 2002 di Provinsi NTB disahkan.

Hingga saat ini Kota Bima telah dipimpin oleh lima putra terbaik, yaitu **Drs. H. Muhtar** yang memimpin Kota Administratif Bima, **H. Muhdar Arsyad** yang memimpin Kota Madya Bima, **M. Nur, SH.** sebagai pejabat pelaksana tugas Walikota Bima, **M. Nur A. Latif**, serta **M. Qurais H. Abidin** sebagai Walikota.

M. Nur A. Latif berpasangan dengan **H. Umar H. Abubakar** sebagai Walikota dan Wakil Walikota pada periode 2003 hingga 2008. Kemudian melalui Pilkada Bulan Mei 2008, M. Nur A. Latif kembali terpilih sebagai Walikota dengan suara mayoritas didampingi oleh M. Qurais H. Abidin sebagai wakilnya untuk periode 2008 hingga 2013.

Pada tanggal 6 Maret 2010, M. Nur A. Latif wafat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Walikota M. Qurais H. Abidin naik menjadi Walikota melanjutkan masa jabatan hingga 2013, didampingi oleh **H. A. Rahman H. Abidin** sebagai Wakil Walikota.

Putra-putra terbaik ini menetapkan komitmen untuk berupaya serta berbuat semampunya untuk mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan menuju masyarakat yang maju dan mandiri sesuai dengan visi Kota Bima.

=====

## Gambaran Umum Wilayah Kota Bima

### Selayang Pandang

Pada tanggal 10 April 2002, lahir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Bima. Tanggal 10 April selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Kota Bima.

Terletak di ujung timur pulau Sumbawa, Kota Bima merupakan sebuah wilayah administratif yang termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini Kota Bima dipimpin oleh M. Qurais H. Abidin sebagai Walikota, dan H. A. Rahman H. Abidin sebagai Wakil Walikota.

Sebagai sebuah daerah yang baru terbentuk, Kota Bima memiliki karakteristik perkembangan wilayah berupa pembangunan infrastruktur yang cepat, perkembangan sosial budaya yang dinamis, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi.

Visi pembangunan daerah Kota Bima tahun 2008-2013 adalah: "*Terwujudnya Kota Bima Sebagai Kota Pendidikan Menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri*".

### Geografi

Kota Bima terletak pada koordinat  $118^{\circ} 41'$  -  $118^{\circ} 48'$  Bujur Timur dan  $8^{\circ} 30'$  -  $8^{\circ} 20'$  Lintang Selatan, dan memiliki luas wilayah  $222,25 \text{ km}^2$ . Asakota merupakan kecamatan yang memiliki luas area terbesar, yaitu  $69,03 \text{ km}^2$ , sedangkan Kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan tersempit dengan luas wilayah hanya  $10,14 \text{ km}^2$ .

Dari 7 (tujuh) sungai yang ada di Kota Bima, Sungai Lampe merupakan sungai terpanjang dengan panjang 25 km.

### Iklim

Berdasarkan data statistik dari lembaga Meterologi dan Geofisika, temperatur maksimum pada tahun 2010 kurang lebih  $34,0^{\circ}\text{C}$ , dan temperatur minimum  $23,1^{\circ}\text{C}$ . Temperatur tertinggi terjadi pada bulan Maret, dan terendah pada bulan Agustus.

Sebagai daerah tropis, Kota Bima mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu kurang lebih 81,3%.

### Wilayah Administrasi

Kota Bima terdiri atas 5 kecamatan dan 38 kelurahan. Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Rasanae Barat, yang terdiri atas 6 kelurahan; Kecamatan Mpunda, yang terdiri atas 10 kelurahan; Kecamatan Rasanae Timur, yang terdiri atas 7 kelurahan; Kecamatan Raba, yang terdiri atas 11 kelurahan; dan Kecamatan Asakota, yang terdiri atas 4 kelurahan.

*(Tampilkan Peta Administrasi)*

### Demografi

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi 2011, jumlah penduduk Kota Bima mencapai 144.018 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 70.761 jiwa dan perempuan sebanyak 73.257 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak adalah di Kecamatan Raba. Sementara kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Rasanae Barat, dengan angka kepadatan 3.101 penduduk per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bima adalah 1,27 persen per tahun.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, pada tahun 2011 pencari kerja yang terdaftar berjumlah 236 orang.

### Agama

Lebih dari 90% penduduk Kota Bima memeluk agama Islam. Kehidupan beragama di Kota Bima berjalan damai dan penuh toleransi. Hingga kini, belum pernah tercatat kejadian konflik beragama. Saat ini Kota Bima mempunyai sarana peribadatan berupa 116 unit masjid, 117 unit musholla, 78 unit langgar, 4 unit gereja, dan 2 unit pura.

### Pemerintahan

Bagi Pemerintah Kota Bima, penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan

kinerja aparatur. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kota Bima adalah: Sekretariat Daerah yang terdiri atas 8 bagian; Sekretariat DPRD; 3 Kantor; 14 Dinas ; 8 Badan, serta 5 Kecamatan dan 38 Kelurahan.

### **Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga upaya mencerdaskan bangsa melalui pendidikan merupakan bagian dari usaha meningkatkan kesejahteraan.

Visi Pemerintah Kota Bima dalam pembangunan dunia pendidikan adalah "*Terwujudnya SDM Berkualitas dan Berdaya Saing*".

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusun kebijakan untuk pembangunan bidang pendidikan berupa: Pemerataan Kesempatan, Peningkatan Mutu dan Daya Saing, dan Perubahan Manajemen dan Pencitraan.

Pemerataan Kesempatan diwujudkan melalui program pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru, peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberian beasiswa miskin.

Peningkatan Mutu dan Daya Saing diwujudkan melalui program peningkatan mutu dan kegiatan *life skill* pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Sementara Perubahan Manajemen dan Pencitraan diwujudkan melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, peningkatan peran dewan pendidikan dan komite sekolah, serta peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah.

Saat ini, jumlah sekolah negeri di Kota Bima adalah: TK 2 unit, SD 73 unit, SMP 14 unit, SMU 5 unit, SMK 4 unit, MI 1 unit, MTs 2 unit, dan MA 2 unit.

Sementara jumlah sekolah swasta adalah: TK 46 unit, SD 7 unit, SMP 6 unit, SMU 9 unit, SMK 5 unit, RA 14 unit, MI 6 unit, MTS 6 unit, MA 4 unit, dan Perguruan Tinggi 5 unit.

### **Kesehatan**

Visi Pemerintah Kota Bima dalam pembangunan bidang kesehatan adalah "*Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Melalui Kemitraan dan Pemberdayaan*".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Bima menyusun beberapa program, antara lain: Menanamkan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih kepada masyarakat; Menurunkan angka kematian bayi dan balita serta ibu melahirkan; Meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi dan air bersih kepada masyarakat; Meningkatkan peran dan fungsi Posyandu; dan Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan seperti Puskesmas dan Poskades.

Saat ini, jumlah Rumah Sakit dan unit pelayanan kesehatan di Kota Bima mencapai 52 unit, yang terdiri atas 1 unit Rumah Sakit, 5 unit Puskesmas, 17 unit Puskesmas Pembantu, dan 29 unit Polindes, yang tersebar di seluruh kecamatan.

### **Perekonomian/Ekonomi Kemasyarakatan**

Jenis mata pencarian penduduk Kota Bima beragam, dengan persentase terbesar adalah pada bidang jasa, kemasyarakatan dan lainnya, yaitu 28%.

*(Tampilkan gambar Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian)*

Untuk penguatan ekonomi kemasyarakatan, Pemerintah Kota Bima menyusun beberapa program, antara lain: Pemberian bantuan dana bergulir bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah; Pemberian bantuan mesin dan peralatan untuk peningkatan teknologi Industri Kecil Menengah; Pemberian bantuan sarana pemasaran pedagang kecil dan kaki lima; Pembangunan hutan kemasyarakatan dan kebun bibit rakyat; serta Perlindungan dan pengelolaan mata air, pencahangan program kali bersih dan penetapan lokasi lahan abadi.

Berkaitan dengan pengelolaan mata air, Pemerintah Kota Bima giat mengeksplorasi keberadaan mata air dengan debit besar, untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk pertanian, maupun air bersih untuk MCK.

Baru-baru ini Pemerintah Kota Bima telah berhasil mengalirkan air dari mata air di Mada Masa wilayah Kecamatan Rasanae Timur, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga setempat.

Kota Bima memiliki 4 sektor unggulan, yaitu pertanian, pertambangan, kelautan, dan pariwisata.

### **Pertanian**

Peningkatan pendapatan petani merupakan salah satu tujuan pembangunan pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut usaha-usaha yang dilakukan meliputi intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi.

Pertanian Kota Bima memiliki 5 subsektor, yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Tanaman bahan makanan meliputi antara lain: padi, jagung, ubi, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Produksi padi pada tahun 2011 sebesar 38.018 ton atau naik sekitar 4,94 persen dari tahun sebelumnya.

### **Perkebunan**

Komoditas unggulan perkebunan di Kota Bima meliputi serikaya, kelapa, asam, kemiri, jambu mete, wijen dan kapuk. Hingga saat ini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan pengembangan baru dilakukan oleh masyarakat setempat dengan skala usaha dan teknologi yang masih terbatas.

### **Kehutanan**

Kota Bima memiliki wilayah hutan seluas 13.154 ha yang memiliki kekayaan berbagai macam komoditas dan *plasma nutfah*. Komoditas yang cukup potensial terdiri dari kayu jati, sonokling dan kayu campuran.

### **Peternakan**

Hingga saat ini jenis ternak yang telah dikembangkan oleh masyarakat setempat adalah: sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam buras dan itik. Kota Bima sesungguhnya memiliki potensi peternakan yang cukup prospektif dengan ketersediaan lahan peternakan dan lahan pakan yang cukup luas.

Di Kota Bima pada tahun 2011 populasi kuda tercatat 2.279 ekor, sapi sekitar 12.034 ekor, dan kerbau 695 ekor. Jumlah ternak kecil tercatat 13.892 ekor kambing dan 743 ekor domba. Sedangkan populasi ayam ras 493.979 ekor, ayam buras 59.141 ekor, dan itik 29.091 ekor.

### **Perikanan dan Kelautan**

Kegiatan perikanan yang telah berkembang di Kota Bima adalah usaha budidaya di perairan laut, perairan air payau dan air tawar. Komoditas yang dibudidayakan meliputi: bandeng, udang, rumput laut, dan ikan air tawar seperti lele dan mujair.

Mutiara produksi Bima telah merambah ke daerah pasaran di luar pulau Sumbawa, bahkan ke pasaran luar negeri, baik dalam bentuk mutiara butiran maupun yang telah dibentuk menjadi perhiasan.

Potensi sumberdaya perikanan Kota Bima merupakan salah satu sektor andalan yang mempunyai kontribusi signifikan bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap, khususnya di wilayah Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Asakota.

### **Pertambangan**

Kota Bima memiliki potensi bahan tambang galena dan marmar. Tambang galena sebelumnya pernah beroperasi, namun izin tambang tersebut kemudian dicabut karena tidak memenuhi beberapa persyaratan selama proses pengoperasian berjalan.

Pencabutan izin tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima agar tidak merugikan masyarakat.

Identifikasi potensi marmer dilakukan 3,5 tahun yang lalu, dan sejak itu dimulailah perjuangan panjang merintis rencana pembukaan tambang marmer ini.

Pada hari Kamis, 15 Desember 2011, dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan fasilitas perkantoran dan pabrik pengolahan batuan marmer PT. Pacific Union Indonesia (POI) di Lingkungan Kadole Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima. Keberadaan tambang marmer diharapkan mampu menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah serta menyerap ribuan tenaga kerja.\*\*\*

### Qurais, dari Pengusaha ke Birokrat

“Orang boleh menyebut saya Raja Tega. Namun saya akan tetap pada gaya kepemimpinan saya yang tegas tanpa pandang bulu”, demikian kalimat yang pernah dilontarkan oleh M. Qurais H. Abidin, yang kini menjabat sebagai Walikota Bima.

Laki-laki kelahiran Bima, tanggal 5 Juli 1962, dari pasangan H. Abidin Ibrahim (Alm) dan H. Maryam Ahmad ini awalnya merupakan Wakil Walikota Bima mendampingi M. Nur A. Latif. Melalui Pemilukada yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2008, keduanya terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bima, untuk masa jabatan periode 2008 hingga 2013. Pasangan ini dilantik pada tanggal 24 Juli 2008.

Pada tanggal 6 Maret 2010, M. Nur A. Latif wafat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Walikota M. Qurais H. Abidin naik menjadi Walikota melanjutkan masa jabatan hingga 2013. Terhitung mulai tanggal 8 Maret 2010 melalui *Radiogram* Mendagri, Qurais menjabat sebagai Pejabat Walikota Bima. Pada tanggal 28 April 2010, ia dilantik menjadi Walikota Bima.

### Perantau dan Pengusaha

Qurais menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Nagasari Banjarmasin pada Tahun 1968 hingga 1974. Memasuki jenjang pendidikan menengah, ia kembali ke tanah kelahirannya, yaitu Bima, dan menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Bima pada Tahun 1975 hingga 1977, serta pendidikan menengah atas di SMA Negeri Bima pada Tahun 1978 hingga 1981. Namun, setamat SMA Qurais kembali merantau, kali ini ke Surabaya.

Meneruskan jejak sang ayahanda, setamat SMA Qurais berkecimpung dalam dunia usaha dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keseriusan mendalami dunia usaha ditandai dengan ditempatinya posisi Direktur CV. H. Abidin pada tahun 1985. Posisi ini ditempatinya hingga tahun 2000.

Kesungguhan menekuni dunia usaha membuahkan banyak keberhasilan dan pencapaian yang membanggakan bagi Qurais. Tercatat berbagai posisi penting pernah dan masih didudukinya, antara lain: Ketua I Kadin Bima Tahun 1999-2004; Ketua II Kadin Bima Tahun 2004-2009; Wakil Ketua Kadin NTB Tahun 1995-1999; Ketua II Hiswana Migas NTB tahun 2006-2010; Direktur PT. Tegas Budi Utama Tahun 1997-Sekarang; Direktur Operasional PT. Bina Mandiri tahun 2000-2005; Direktur PT Safiry Gas Bima-Dompu; Direktur SPBU Amahami Bima; Ketua IPHI Kota Bima Tahun 2007- Sekarang; serta Direktur SPBU Panda Bima.

Kiprah di dunia politik diawali dengan menjadi Pengurus (Bendahara) partai Golkar Kabupaten Bima periode tahun 1987-1988. Langkah besarnya adalah maju sebagai calon Wakil Walikota mendampingi M. Nur A. Latif pada Pemilukada Kota Bima tahun 2008. Langkah ini mengantarkannya menjabat sebagai Wakil Walikota Bima Periode tahun 2008-2010, dan sebagai Walikota Bima periode 2010- 2013.

### Komitmen bagi Daerah

Pada tanggal 6 Maret 2010, M. Nur A. Latif wafat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Walikota M. Qurais H. Abidin naik menjadi Walikota melanjutkan masa jabatan hingga 2013. Terhitung mulai tanggal 8 Maret 2010 melalui *Radiogram* Mendagri, Qurais menjabat sebagai Pejabat Walikota Bima.

Kepergian Nur Latif meninggalkan kedukaan yang dalam pada masyarakat Kota Bima. Namun Qurais menyadari, ada banyak pekerjaan yang tertinggal, yang untuk melanjutkannya dibutuhkan segenap daya dan upaya serta semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat Kota Bima. Semboyan yang kerap digaungkan oleh Nur Latif untuk *tidak membiarkan matahari berlalu tanpa makna*, akan tetap dihidupkan dan menjadi nafas perjuangan membangun Kota Bima selanjutnya.

Pada tanggal 28 April 2010, M. Qurais H. Abidin dilantik menjadi Walikota Bima. Lima bulan kemudian, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2010, H. A. Rahman H. Abidin dilantik sebagai Wakil Walikota mendampingi Qurais. Pasangan ini segera mengawali



kerja besar melanjutkan pembangunan Kota Bima dengan melakukan pemetaan secara menyeluruh mengenai kondisi Kota Bima, terkait potensi, tantangan, dan masalah yang tengah dihadapi.

Tantangan pertama adalah keluar dari status *disclaimer* yang disematkan BPK bagi pengelolaan keuangan Kota Bima. Seluruh kemampuan pemerintah daerah dicurahkan untuk keluar dari permasalahan tersebut. Dimulai dengan pembenahan manajemen dan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah. Sebagai wujud komitmen untuk keluar dari status *disclaimer*, pada hari Senin tanggal 4 April 2011 Walikota menandatangani *Memorandum of Understanding* atau Nota Kesepahaman dengan BPK untuk membenahi manajemen keuangan daerah.

Walikota juga mewajibkan pejabat Eselon II hingga IV Lingkup Pemerintah Kota Bima untuk menandatangani pakta integritas dalam rangka mewujudkan tertib administrasi serta pengelolaan keuangan daerah yang jujur dan akuntabel.

Perjuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima keluar dari status tanpa pendapat dari auditor (*disclaimer*) terhadap laporan keuangannya, akhirnya tercapai. Komitmen lain Qurais yang ingin diwujudkan selama masa pemerintahannya adalah penempatan aparatur yang sesuai kompetensi, pelayanan masyarakat yang optimal, serta menekankan sikap jujur dan ikhlas dalam pengabdian, semua ini merupakan pondasi yang kuat bagi pembangunan daerah Kota Bima kedepan.

### **Penyayang Keluarga**

Pada tahun 1986, tepatnya tanggal 22 Februari, M. Qurais H. Abidin menikah dengan Hj. Yani Marlina, putri dari pasangan Asmuin Hadi (Alm) dan Hj. Duriana. Pernikahan ini membuahkan empat orang anak, yaitu: Selvy Novia Rahmayani, M. Ridho Zoelfikar, M. Ryan Kusuma Permadi, dan M. Rayindha Prasatyayang.

Pria yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 27 RT/RW 06/03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat ini dikenal menyayangi keluarga. Ia sering melontarkan pernyataan bahwa ketakutan terbesarnya dalam hidup adalah melihat anak-anaknya tidak bahagia dan terjerumus kedalam pergaulan yang salah.

### **Cinta Sepakbola**

Laki-laki yang memiliki hobi travelling ini juga sangat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sejak remaja, ia telah menunjukkan bakat memimpin, terbukti dengan terpilihnya sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Santiang Surabaya periode tahun 1982-1985.

Kecintaannya pada olahraga sepakbola mengantarkannya menjadi Ketua Persebi Kabupaten Bima periode Tahun 1987-1993 serta Wakil Ketua PSSI NTB periode Tahun 1993-1997. "Saya ingin melihat tim sepakbola Kota Bima berlaga di divisi utama", demikian ujar pria yang mengaku sangat mengidolakan klub sepakbola Barcelona dan tim nasional Spanyol.

Kecintaan pada olahraga inilah yang menjadi salah satu motivasinya giat membangun infrastruktur penunjang olahraga di Kota Bima. Kerja besar yang tengah diperjuangkannya adalah membangun gedung olahraga Manggemaci. Proyek ini kini tengah berjalan.

Dengan masa jabatan yang akan segera berakhir, Qurais bertekad untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan yang telah diagendakan.\*\*\*

### Terpanggil Menerjuni Politik Sejak Muda

Pada tanggal 28 April 2010, M. Qurais H. Abidin dilantik menjadi Walikota Bima. Lima bulan kemudian, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2010, H. A. Rahman H. Abidin, yang juga merupakan adik dari Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, dilantik sebagai Wakil Walikota mendampingi Qurais. H. A. Rahman H. Abidin, atau biasa disapa Aji Man, terpilih menjadi Wakil Walikota atas usulan dan dukungan DPRD Kota Bima.

### Tertarik Politik Sejak Muda

Berbeda dengan saudaranya yang aktif di dunia usaha, Aji Man sejak muda sudah tertarik untuk terjun ke dunia politik. Pria kelahiran Bima, 31 Desember 1966, ini secara nyata mulai berkiprah dalam dunia politik pada tahun 2003, dengan menduduki posisi Ketua Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) periode tahun 2003-2009.

Melalui partai ini pula ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kota Bima 2004 - 2009.

Pada tahun 2005, PPDK mengalami perubahan nama menjadi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), dan Aji Man kembali terpilih menjadi Ketua untuk periode 2005 – 2010 dan kembali menjadi anggota DPRD Kota Bima dengan masa tugas hingga tahun 2014.

Aji Man memiliki perjalanan karir politik yang cukup panjang. Beberapa jabatan pernah ditempatinya, antara lain Ketua Gapensi Kota Bima periode tahun 2004 - 2009; Ketua Komisi C DPRD Kota Bima periode tahun 2004 – 2009; Ketua Fraksi Demokrasi Keadilan periode tahun 2004 – 2009; serta Ketua Komisi III DPRD Kota Bima Tahun 2009.

### Pendidikan dan Keluarga

Aji Man menempuh pendidikan formal hingga jenjang strata 1, dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Pendidikan dasar ditempuhnya di SDN 2 Bima pada tahun 1979, sementara pendidikan menengah ditempuhnya di SMPN II Bima pada tahun 1982 dan SMA Negeri Bima pada tahun 1985. Pendidikan sarjana diselesaikannya pada tahun 1990.

Pernikahannya dengan Ny. Hj. Badrah Ekawati membuahkan enam orang putra dan putri, yaitu: Intan Putri Rahmawati, Nurul Najmi, M. Rizky Saputra, M. Taufik Hidayat, Saskia Amecca Putri, dan Fatih Nabila Putri.

Dikenal dengan kemampuan berorasi yang baik, pria yang beralamat di Jalan Gatot Soebroto BTN Sadia Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda ini selalu mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat dalam banyak kesempatan berdialog atau bersilaturahmi.

“Sambutan positif masyarakat merupakan pijakan awal bagi kita untuk membentuk pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan dengan efektif”, ujarnya. Ia berjanji akan menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat Kota Bima dalam menunaikan tugasnya mengabdikan demi kesejahteraan dan kemajuan daerah.\*\*\*

### Teknisi yang Berpikir Praktis

Muhammad Rum, demikian nama lengkap pria kelahiran Bima, 4 Oktober 1956, yang kini menjabat Sekretaris Daerah Kota Bima. Ia merupakan seorang insinyur teknik sipil lulusan Universitas Hasanudin Makassar, atau yang pada masa ia menempuh studi bernama Ujung Pandang.

Rum menghabiskan masa kecilnya di Sape, Kabupaten Bima. Ia menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SDN Negeri Sape pada tahun 1969. Selanjutnya ia menyelesaikan pendidikan menengah pada SMP Negeri Sape pada tahun 1972 dan SMAN 1 Bima pada tahun 1975.

Ia melanjutkan sekolah ke Universitas Hasanuddin Makassar dan berhasil masuk Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil. Gelar Insinyur diraihnya pada tahun 1985.

Pernikahannya dengan Ir. Baji Makkarumpa membuahkan tiga orang putri dan seorang putra, yaitu Nur Lailul, Nahyani, Wisda Rubikarti, dan Zayed Elfasa.

Delapan tahun kemudian, tepatnya tahun 1990, Rum diangkat menjadi PNS dengan SK Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor Kep.005/A/W/23/90.M. Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Rum memiliki perjalanan karir yang panjang. Sebelum bergabung dengan Pemerintah Kota Bima, Rum sempat mengabdikan dalam jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 1995 hingga 2001, Rum mengabdikan di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB dan dipercaya menangani bidang kecipta-karyaan yang mengurus masalah penyehatan lingkungan pemukiman. Kemudian Rum juga dipercaya menangani proyek kebina-margaan jalan dan jembatan se-Provinsi NTB.

Hendak mengabdikan di tanah kelahiran, pada tahun 2001 pun Rum memutuskan hijrah ke Kabupaten Bima. Kinerja dan kompetensi membuatnya dipercaya menempati sejumlah jabatan penting.

Pada tahun 2001 ia diangkat menjadi Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Bina Marga PU Kabupaten Bima. Setahun kemudian ia dipercaya menjadi Kepala Dinas Pemukiman Prasarana dan Wilayah (Kimpraswil) Kabupaten Bima. Jabatan ini ditempatinya selama lebih kurang tiga tahun. Selanjutnya pada tahun 2005, ia diangkat menjadi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima.

Tahun 2006 Rum memutuskan pindah ke Kota Bima. Berdasarkan *track record* (rekam jejak) karirnya, ia pun kembali ditempatkan pada bidang yang memang telah digelutinya sejak lama, yaitu sebagai Kepala Dinas Kimpraswil Kota Bima. Pada tahun 2008 ia menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bima.

Sebuah lompatan besar dalam karirnya terjadi pada awal tahun 2012, yaitu ketika ia dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Bima, yang sebelumnya dipegang oleh Drs. H. Tajuddin yang telah memasuki masa pensiun.

Pertengahan tahun 2012, untuk mendapatkan seorang Sekda definitif, Pemerintah Kota Bima mengajukan tiga nama untuk menjalani tes, salah satu dari ketiga nama tersebut adalah Ir. Muhammad Rum. Berhasil meraih nilai terbaik dalam tes, Rum pun terpilih menjadi Sekda Kota Bima dan dilantik pada tanggal 1 Agustus 2012.

Sebagai seorang insinyur dan pengalaman bertahun-tahun menggeluti bidang teknis, Rum terbiasa menerapkan cara berpikir teknis dan praktis, dan sikap ini terbawa dalam kesehariannya menjalankan tugas sebagai Sekda Kota Bima.

Dalam melaksanakan tugas, ia berusaha untuk selalu melakukan indentifikasi masalah dan mengembangkan alternatif pemecahannya, serta menentukan alternatif terbaik berdasarkan asumsi-asumsi yang logis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan masa tugas yang tidak lama lagi, Ir. Muhammad Rum bertekad akan memanfaatkan masa jabatan yang singkat ini untuk berusaha menciptakan berbagai terobosan dan langkah inovatif untuk pembangunan daerah Kota Bima.\*\*\*

## PROFIL KETUA DPRD KOTA BIMA 2009-2014, HJ. FERRA AMALIA, SE.,MM.,

### Srikandi Legislatif Kota Bima

Sedikit sekali perempuan yang sejak awal menentukan politik sebagai pilihan dirinya untuk berkiprah, sehingga masuknya perempuan ke arena politik lebih banyak sebagai keadaan yang tak terduga. Namun wanita tangguh yang satu ini mampu menunjukkan eksistensinya di dunia politik. Awal kiprahnya dimulai sejak terpilihnya menjadi anggota DPRD Kota Bima, sekaligus pemegang suara terbanyak sehingga ibu dari Moch. Jefara Al-Amin dan Ferly Permata Sari juga didaulat menjabat ketua DPRD Kota Bima Periode 2009- 2014.

Perempuan kelahiran Bima tanggal 1 Maret 1966, tepatnya 46 tahun yang lalu dari pasangan H Putra Abdul Kahir (Alm) dan Hj. Retna murni Zubaidah juga merupakan cucu dari Sultan Salahuddin yang memimpin kerajaan Bima. Lahir dari lingkungan kerajaan tidak membuatnya sungkan untuk mengabdikan pada masyarakat, hingga pada pemilu legislatif tahun 2009 setelah melalui proses panjang dan ketat, Hj. Ferra Amalia terpilih menjadi salah satu anggota DPRD Kota Bima Dapil II, Rasanae barat dan Mpunda.

Sebagai anggota legislatif, Hj Ferra Amalia, menyadari bahwa untuk bisa melakukan kinerjanya dengan baik sebagai wakil rakyat, kemampuan bukanlah satu-satunya penentu, karena ada banyak faktor lain yang berasal dari luar dirinya. Kesamaan misi dan visi yang dibangun baik bersama dengan partai maupun anggota legislatif lain juga tidak kalah pentingnya.

#### **Tumbuh Besar di Luar Daerah, Akhirnya kembali ke tanah Kelahiran**

Ferra menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 04 Mataram pada tahun 1972 hingga 1977. Memasuki jenjang pendidikan menengah, ia pindah ke Jakarta, dan menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 40 Jakarta dan menamatkan pendidikan di bangku menengah pertama pada tahun 1981. Menginjak pendidikan menengah atas di SMA Negeri 07 Gambir Jakarta pada tahun 1982 hingga 1984.

Ibu dari dua orang anak ini kemudiaman melanjutkan studi di universitas Islam Al-Azhar Mataram dan menyelesaikan studi pada tahun 2007, dengan gelar sarjana ekonomi. Tidak puas hanya sampai jenjang strata 1, Ferra disela-selanya mengabdikan menjadi Ketua DPRD Kota Bima, melanjutkan ke jenjang Strata 2 di STIE Mahardika Surabaya, dan meraih Gelar Magister Manajemen pada tahun 2011.

Meneruskan jejak saudara tercinta H. Ferry Zulkarnain ST, yang kini menjabat sebagai Bupati Bima, Hj Ferra Amalia juga melebarkan kiprahnya di dunia politik. Keseriusannya di dunia politik terbukti dengan terpilihnya menjadi ketua pada partai besar berlambang beringin, Golkar, yakni tepatnya Ketua DPD II Golkar kota Bima.

#### **Keluarga tetap yang Utama**

Bertemu dengan suami tercinta Drs. H. Djohan Hudoyo, putra pasangan H. Asmaini Bisri (Alm.) dan Hj. Siti Mahsuhoh, yang keduanya asli dari Ngelegok Blitar. Kemudian menikah di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 1994. Pernikahan ini membuahkan 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan, Moch jefara Al-Amin dan Ferly Permata Sari.

Keluarga menjadi prioritas utama disela kesibukannya menjadi wakil rakyat, di kediamannya jalan Sulawesi No.5 Kota Bima, menjadi tempat melepas penat dan berkumpul dengan keluarga besarnya.\*\*\*

### **Tokoh Muda yang Tekun**

Tokoh yang satu ini memang patut menjadi panutan. Ia muda, disiplin, tekun, dan ulet dalam bekerja. Karena itulah, kini pria kelahiran Bima 44 tahun yang silam, tepatnya tanggal 31 Desember 1968 ini sukses meniti karirnya di politik. Puncak dari perjalanan panjangnya itu dibuktikan lewat keberhasilannya, terpilih kembali pada pemilu legislatif pada 2009-2014, setelah sebelumnya menjadi anggota DPRD Kota Bima periode 2004-2009.

Dua kali terpilih menjadi wakil rakyat tentunya menjadikan Ferry sebagai panutan yang dekat di hati masyarakat, terutama di Daerah Pemilihannya di Kecamatan Asakota. Kepiawaiannya berpolitik makin terbukti ketika ia berhasil terpilih sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Bima.

### **Riwayat Hidup**

Semasa kecil Ferry menjalani hidup seperti kebanyakan anak pada umumnya, tidak ada yang istimewa. Lahir dari pasangan H. Ibrahim dan Ibu Junari (Alm) yang bermukim di Kelurahan Penatoi. Ferry memulai dunia pendidikannya di salah satu SD (Sekolah Dasar) INPRES 13 Raba dan tamat pada tahun 1979. Begitu juga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Ia menamatkan pendidikan di bangku SLTP pada tahun 1984 di SMPN 1 Bima. Usai itu, anak ketiga dari lima bersaudara ini melanjutkan studinya ke SLTA di SMA Negeri 2 Bima. Dan, selesai tahun 1987.

Tak puas sampai di situ saja. Makin lama ia belajar, semakin terasa bahwa ia masih banyak kekurangan ilmu. Karena itulah, usai menamatkan bangku sekolah menengah atas, kemudian ia merantau ke pulau lombok tepatnya Kota Mataram untuk melanjutkan studi di fakultas Hukum universitas Mataram, kemudian sukses meraih gelar sarjana pada tahun 1992. Di bangku kuliah inilah, ia banyak ditempa dengan keadaan. Bahkan ia mulai memahami makna dari sebuah kehidupan. Hidup adalah perjuangan. Begitulah ia berprinsip. Terakhir, Ferry dipercaya menjabat sebagai Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima periode 2009-2014.

### **Selalu Membangun Komunikasi dengan Keluarga**

Sibuk dengan urusan politik dan memimpin daerah tak membuat Ferry Sofyan mengabaikan keluarga. Menurut istrinya, Ibu Jumriah, Ferry Sofyan adalah suami yang mempunyai perhatian besar terhadap keluarga. Meski terkadang sangat sibuk dan harus berada jauh dari keluarga, ia juga selalu menjaga komunikasi dengan istri dan anak-anaknya. Kegiatannya setiap hari terbilang cukup padat. Walaupun begitu, kalau dia pergi ke luar kota misalnya, dia selalu tetap memberikan kabar ketika sedang jauh dan sebagainya.

Bapak dari tiga anak yakni Yusti Febriyanti, Qamarrah Munirah dan M. Ferdi Yandi ini juga gemar menghabiskan waktunya untuk bermain sepak bola. Olah raga ini menjadi olah raga kegemarannya sejak kecil. Sehingga disela-sela kesibukannya ia selalu menyempatkan diri untuk bermain bola.

### **Mengabdikan di Jalur Politik**

Pria yang beralamat di lingkungan Santi Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda ini mempunyai alasan kuat untuk terjun ke politik praktis. Bukan sekedar latah, apalagi untuk mengejar prestise dan kekayaan materi. Maka dalam masa kerjanya ini, dia bertekad untuk berbuat yang terbaik sesuai yang dia mampu. "Saya ingin menjalankan amanah dan berbuat yang terbaik untuk daerah kita lewat jalur politik. Lapangan pengabdian itu juga ada di jalur politik".\*\*\*

## PROFIL WAKIL KETUA DPRD KOTA BIMA 2009-2014, AHMAD MIFTAH, S. SOS

### **Politisi yang Murah Senyum**

Ahmad Miftah, S.Sos, pria kelahiran Bima 12 April 1978 di usianya yang terbilang masih muda, ia telah melebarkan sayap dan menunjukkan kiprahnya di dunia politik. Pernah menjadi Ketua DPC Partai Demokrat periode 2002-2010, menjadi salah satu pengalamannya di dunia politik sebelum akhirnya digantikan oleh Walikota Bima, H. M Qurais H. Abidin.

Amanat yang kini diembannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima Periode 2009-2014 tidak membuat jebolan STISIP Mbojo ini lupa dalam menekuni dunia organisasi sosial lainnya di masyarakat. Baginya, pengorbanan itu tidak hanya materi, tetapi juga waktu dan tenaga yang semuanya untuk diberikan kepada orang lain.

### **Hobi Membaca**

Pria yang memulai karir politik sudah sejak tahun 2002 ini juga sangat gemar membaca berbagai buku referensi dan membuka wawasan dengan menonton berbagai macam sajian berita maupun informasi di televisi. Meski saat ini dia lebih disibukkan dengan dunia politik, ia juga gemar menghabiskan waktunya untuk bersepeda, baginya bersepeda menjadi olahraga yang sangat menarik.

Namun, apa yang dijalani sekarang merupakan salah satu rahmat dan kehendak Tuhan YME. Suami dari Ibu Nurlailah S. Sos ini juga terkenal sangat murah senyum, baginya pula apa yang didapat merupakan buah dari kerja keras dan usaha yang tidak mudah, tapi harus tetap dengan kejujuran dan optimisme yang tinggi serta bersungguh-sungguh. "Dengan begitu nantinya hasil yang dicapai juga memuaskan serta semua apa yang dicita-citakan mudah-mudahan tercapai," ungkapnya.

Tempaan ini tentunya didapat sejak ia duduk dibangku sekolah. Menamatkan bangku sekolah dasar pada tahun 1990 di SDN Inpres Nae Bima. Kemudian melanjutkan jenjang menengah pertama di SMPN 2 Bima hingga selesai pada tahun 1993, dan melanjutkan ke jenjang menengah atas di SMAN 1 Bima dan tamat pada tahun 1996. Karena kecintaannya pada tanah kelahirannya, Miftah melanjutkan studi di STISIP Mbojo dan meraih gelar Sarjana pada tahun 2002.

### **Tak Anti Kritik**

Dengan pencapaian pembangunan yang ada di Kota Bima saat ini, Bapak dari M Naufal Ziqri dan Naila Fakhirah mengaku akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat bagi kemajuan masyarakat. "Saya berada di DPRD ini merupakan pilihan masyarakat, maka dari itu sayapun akan selalu berbuat untuk masyarakat. Hingga masyarakat kita bisa maju dan berkembang seperti masyarakat di daerah lainnya," ujarnya.

Mengenai karirnya di dunia politik, Putra dari Bapak M. Tahir Yasin ini selalu berupaya untuk menjadi sosok yang tidak anti kritik. Sebab menurutnya, saat ini cukup banyak orang-orang yang anti kritik. "Kritik itu sebenarnya untuk membangun. Kalau kita

anti kritik, bagaimana kita bisa tahu terutama kemampuan kita. Apalagi seperti sekarang saya merupakan wakil rakyat. Kalau saya anti kritik bagaimana saya bisa mengetahui apa yang telah saya lakukan untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.\*\*\*

## Berbagai Program Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Kota Bima menyadari, untuk menjadikan Kota Bima sebagai salah satu destinasi wisata, diperlukan kemapanaan infrastruktur dasar, mencakup infrastruktur jalan dan terminal transportasi, ketersediaan energi, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Maka pada tahun 2012, Pemerintah Kota Bima pun menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai program utama.

### **Jalan Melayu – Kolo**

Sebagai urat nadi perekonomian, maka infrastruktur menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Bima.

Terkait upaya menjadikan Kolo sebagai kawasan wisata, maka perbaikan jalan Melayu – Kolo terus digiatkan. Ruas jalan sepanjang lebih kurang 10 km antara Kelurahan Melayu dan Kolo inipun mulai dilebarkan dan dihotmix.

Pada tahun 2010, proyek ini mendapat alokasi anggaran sebesar 5 milyar rupiah dari PT. Newmont Nusa Tenggara. Pada Tahun 2011 mendapat anggaran 3 milyar rupiah dari Dana Alokasi Khusus dan 5 milyar rupiah dari APBN. Tahun 2012 kembali mendapat bantuan sebesar 11 milyar rupiah dari PT. PLN.

### **Pembangunan Jalan 2 Arah Niu - Ama Hami**

Sebagai pintu masuk Kota Bima, terhadap kawasan Niu hingga Amahami terus dilakukan pembenahan, antara lain dengan membangun jalan raya dua jalur. Selain untuk memperindah wajah kota, pembangunan jalan dua jalur dimaksudkan untuk melancarkan arus lalu lintas keluar masuk Kota Bima yang kini semakin padat.

### **Pembangunan Jalan Padolo III**

Keberadaan Pelabuhan Bima berpengaruh langsung terhadap meningkatnya kepadatan arus lalu lintas. Akibatnya banyak kendaraan besar yang menggunakan jalur protokol untuk aktifitas bongkar muat pada kawasan sekitar pelabuhan. Untuk mengurangi kemacetan akibat aktifitas tersebut, kemudian dibangun ruas jalan Padolo III.

Pembangunan ruas jalan ini sekaligus diproyeksikan sebagai urat nadi pengangkutan hasil pertambangan marmer.

### **PLTU Bonto**

Untuk menjamin ketersediaan energi listrik, Pemerintah Kota Bima merintis pembangunan PLTU. Dahlan Iskan, yang pada saat itu menjabat sebagai Dirut PT (Persero) PLN, pada hari Senin, 5 Juli 2010, meninjau langsung aktifitas pelaksanaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) I NTB Wilayah Bima di Lingkungan Bonto Kelurahan Kolo Kota Bima.

Dalam lawatannya di PLTU berkapasitas 2 x 10 MW tersebut, Dahlan bersama seluruh jajaran Direksi diterima oleh Walikota Bima M. Qurais H. Abidin serta seluruh civitas PLN Cabang Bima. Hadir menemani Dahlan, salah seorang Anggota DPR RI Dapil NTB, Muhammad Syafruddin ST.

*(Tampilkan foto Walikota dengan Dahlan Iskan)*

Keberadaan PLTU ini diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan listrik tidak hanya untuk wilayah Kota Bima, namun juga Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa.

### **Pelabuhan Bima**

Sejak terbentuk pada tahun 2002, Kota Bima meskipun dalam kondisi yang serba terbatas, terus berbenah diri. Alhamdulillah dengan keterbatasan tersebut Kota Bima mampu menempatkan diri menjadi salah satu daerah yang menjadi barometer perekonomian Provinsi NTB, sebagaimana yang disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada HUT Kota Bima tahun 2010.

Letak Kota Bima yang berada pada segitiga emas yang menghubungkan antara Kawasan Indonesia Bagian Barat, Timur dan Tengah, menjadi sebuah anugerah yang patut disyukuri.

Kondisi ini harus diimbangi dengan pembangunan dan pengembangan berbagai sarana dan fasilitas penunjang yang representatif, seperti terminal AKAP, bandara,



pelabuhan laut, penginapan ataupun hotel, ketersediaan tenaga listrik, dan fasilitas penunjang lainnya.

Pelabuhan Bima menjadi prioritas tersendiri bagi Kota Bima. Pengembangan fasilitas pelabuhan laut menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kota Bima. Pelabuhan laut Kota Bima memiliki nilai strategis, baik dalam hal distribusi barang maupun transportasi.

Dengan total anggaran sebesar 104 milyar rupiah, rencana pengembangan pelabuhan bima meliputi beberapa item, yaitu: reklamasi, pembungan trustel, dermaga, dan fasilitas lainnya.

Pada hari Kamis, 28 April 2011, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang Pelabuhan Bima. Untuk pembangunan pelabuhan Bima, pada tahun 2011 Pemerintah Kota Bima mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar 24 milyar rupiah, dan tahun 2012 mendapat alokasi 46 milyar rupiah.

Gubernur dan Wakil Gubernur pun telah melakukan peninjauan terhadap tahapan pengembangan tersebut.

### **Terminal AKAP**

Sementara itu, rencana pengembangan terminal AKAP telah dirintis sejak bertahun-tahun yang lalu, namun masih terkendala masalah ketersediaan lahan. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Bima berencana mereklamasi laut di kawasan Ni'u, yang merupakan pintu masuk Kota Bima.

### **Pembangunan Fasilitas Olahraga KONI Manggemaci**

Dalam upaya memajukan dunia olahraga, Pemerintah Kota Bima membangun fasilitas olahraga KONI di Stadion Manggemaci, Kecamatan Mpunda Kota Bima. Tahun ini Pemerintah Kota Bima mendapat kucuran dana dari APBD I sebesar 5 milyar rupiah untuk pembangunan fasilitas olahraga tersebut.

### **Rencana Kedepan – *Grand Design***

Perkembangan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat telah memperkuat posisi Kota Bima sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah regional Nusa Tenggara. Konsekuensinya adalah terlihat secara jelas perubahan wajah kota dengan pesatnya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun dan meningkatnya volume arus lalu lintas yang terjadi secara signifikan dalam lima tahun terakhir.

Tahun 2012, Kota Bima masuk dalam program *Master Plan* Percepatan Pembangunan Indonesia (*MP3I*), khususnya untuk sektor ekonomi. Masih banyak program yang ingin dituntaskan oleh Pemerintah Kota Bima, antara lain:

- ❖ Pembangunan ruas jalan Padolo III untuk mengurai kemacetan akibat aktifitas bongkar muat pada kawasan sekitar pelabuhan;
- ❖ Merintis pembangunan Universitas Negeri Bima dan Politeknik Bima;
- ❖ Revitalisasi mata air;
- ❖ Pembangunan Terminal di Gasu Lampe;
- ❖ Pembangunan Paruga Nae di bekas terminal Kumbe dan Terminal Dara;
- ❖ Penuntasan pembangunan masjid raya Al-Muwahiddin dan Masjid At-Taqwa;
- ❖ Reklamasi pantai Ama hami – Lawata; serta
- ❖ Pemusatan area pergudangan untuk menghindari macet.

Perjalanan kedepan masih akan panjang. Dengan rasa syukur dan semangat juang, masih banyak harapan yang akan dicapai oleh Pemerintah bersama masyarakat Kota Bima. \*\*\*

## Pariwisata dan Kebudayaan Khas Daerah Kota Bima

Karena posisinya yang terletak di tengah-tengah segitiga emas tujuan pariwisata nasional, yaitu Bali, Pulau Komodo, dan Bunaken, Kota Bima memiliki fungsi strategis sebagai kota transit. Namun lebih dari itu, Kota Bima sendiri memiliki berbagai potensi pariwisata untuk ditawarkan, khususnya wisata alam.

Visi pembangunan bidang pariwisata adalah "*Mendorong Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kepariwisata Yang Berwawasan Budaya, Ramah Lingkungan dan Melibatkan Peran Serta Masyarakat Luas*".

Ada beberapa potensi pariwisata yang ditawarkan oleh Kota Bima, mulai dari wisata alam hingga wisata budaya.

### Kolo

Kawasan sepanjang Teluk Bima memiliki keindahan yang memukau. Sisi utara Teluk Bima memanjang sekitar 20 kilometer dari ujung utara kelurahan Melayu hingga kelurahan Kolo. Di sini terbentang pantai-pantai dan teluk-teluk mungil yang indah mempesona.

Ada empat teluk mungil yang telah lama menjadi tempat persinggahan kapal-kapal nelayan dan para pedagang sejak dulu, yaitu teluk So Nggela, Toro Londe, Bonto, serta Kolo.

### Festival Kuda

Sejalan dengan program pemerintah daerah untuk menjadikan Kota Bima sebagai salah satu destinasi wisata, pada bulan Juli 2011, Kota Bima menggelar Festival Kuda Bima, yang merupakan bagian dari program Visit Lombok-Sumbawa yang diresmikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan Festival Kuda ini sukses mengusung slogan "Ingat Bima Ingat Kuda, Ingat Kuda Ingat Bima". Festival Kuda menjadi *event* tahunan Kota Bima.

### Kerajinan Tenun

Kerajinan Tenun atau dalam Bahasa Mbojo dikenal dengan "Muna ro Medi" sudah lama dikenal oleh masyarakat Bima. Menurut berbagai sumber yang dapat dipercaya, sejak awal abad 15, hasil kerajinan Muna ro Medi sudah menjadi barang dagangan yang laris di beberapa wilayah Nusantara. Dan sekian banyak jenis barang hasil kerajinan Muna ro Medi yang paling terkenal adalah Tembe (Sarung), Sambolo (Destar) dan Wen (sejenis ikat pinggang).

Keberpihakan Walikota terhadap industri kecil dan tenunan ikat Bima juga ditunjukkan dengan penetapan tenun ikat Bima sebagai seragam kerja para pegawai negeri maupun honorer daerah pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Bima. Kebijakan ini diharapkan dapat menghidupkan industri tenun ikat Kota Bima yang akan berdampak ganda pada banyak elemen masyarakat, mulai dari penenun, pengusaha penjual tenunan ikat, hingga para penjahit.

Saat ini, menurut daftar Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bima, terdapat 1.500 pengrajin tenun di seluruh wilayah Kota Bima. Mereka tersebar di beberapa kelurahan, meliputi Ntobo, Rabadompu Barat, Rabadompu Timur, Oi Fo'o, Nitu, Lelamase, Kumbe, dan Nungga. Dari 1.500 pengrajin tenun ini, dibentuk 170 kelompok pengrajin, dengan pembagian berdasarkan lokasi. Dinas Koperindag berperan sebagai pembina kelompok pengrajin, yaitu dengan memberikan bantuan dana bergulir, bantuan fasilitas dan bahan baku, serta pembinaan dan pelatihan keterampilan.

Tenun Ikat Bima pernah dikenakan oleh Kepala-Kepala Negara Pertemuan APEC di Bali tahun 2008. Termasuk dikenakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menyampaikan Visi Misinya sebagai Calon Presiden di hadapan Anggota KADIN pada Pemilu Pilpres Tahun 2009. Hal ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan bahwa daerah kecil di ujung timur NTB ini memiliki segudang potensi alam dan budaya yang perlu dikembangkan.

### **Oi Ta'a**

Melintasi sepanjang jalan lintas Bima-Sape, tepatnya di sebelah timur Terminal Kumba Kota Bima, kita akan menemukan kedai-kedai Oi Ta'a atau air Lontar yang dijual warga. Oi Ta'a, atau sebagian orang Bima juga menyebutnya dengan Oi Tua, ini untuk satu botol kemasan yang berisi 500 ml dijual seharga Rp.5000,-. Sedangkan botol kemasan yang berisi 1500 ml dijual dengan harga Rp.10.000.

Memperoleh air lontar tentu tidaklah mudah. Hanya orang-orang tertentu dan yang memiliki keahlian memanjat pohon lontar yang dapat mengambilnya. Karena ketinggian pohon-pohon lontar ini bisa mencapai lebih dari 20 meter. Pada umumnya ketinggian pohon lontar berkisar antara 15 sampai 20 meter. Kehati-hatian dan kondisi prima sangat dibutuhkan dalam memanjat pohon lontar, karena sering kali terjadi pemanjat yang jatuh dan menyebabkan patah tulang hingga berujung kematian. Untuk memanjat pohon lontar, warga Oi Mbo biasa menggunakan *Rangge*. Rangge adalah semacam tangga yang dibuat dari bambu yang dikenal dengan O'o To'do.

Waktu yang tepat untuk mengambil air lontar adalah pada pagi hari dan sore hari. Sementara produksi air lontar yang melimpah di Oi Mbo ini berlangsung dan bulan April hingga Agustus. Pada musim hujan produksi air lontar dari kebun-kebun warga berkurang.

Agar air lontar tahan lama dan bisa disimpan dalam botol selama dua sampai tiga hari, warga merebus sekitar setengah jam. Karena berdasarkan pengalaman warga, air Lontar hanya bertahan beberapa jam, setelah itu akan terasa asam. Oleh karena itu, meminum air Lontar yang menyegarkan adalah pada saat baru diambil dan pohonnya. Disamping airnya, lontar memiliki banyak manfaat antara lain daunnya dapat digunakan sebagai bahan membuat rokok, bahan topi dan untuk membuat payung (Paju Longge) dalam upacara-upacara adat Bima. Sementara bijinya sangat gurih.

### **Hanta U'a Pua**

Hanta U'a Pua merupakan salah satu upacara adat yang telah digelar turun temurun pada masa lalu, terutama pada masa-masa keemasan dan kejayaan kesultanan Bima. Upacara adat yang erat kaitannya dengan sejarah masuknya agama Islam di Tanah Bima ini, telah menjadi rutinitas seluruh elemen masyarakat Bima sejak dekade awal masuknya Islam. U'a Pua dilaksanakan pada bulan Rabi'ulawal, bertepatan dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun.

Pada masa lalu, sebelum upacara adat U'a Pua dilaksanakan sebagai puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, diawali oleh kegiatan-kegiatan atraksi seni budaya tradisional dan pengajian Al-Qur'an selama tujuh hari tujuh malam. Seluruh seniman dan pendekar dari berbagai pelosok desa dalam wilayah Kesultanan Bima berkumpul di Lapangan Sera Suba untuk mempertunjukkan kehebatannya. Dan pada puncak peringatan Maulid, Hanta U'a Pua pun digelar.

Diawali pemukulan Ranca Na'e pada pukul 6 pagi dan lonceng Gerbang Istana (Lare-Lare Asi). Hal tersebut dimaksudkan sebagai permakluman bahwa hari upacara adat telah tiba. Kemudian pada sekitar pukul 7 pagi, utusan Sultan yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, anggota Laskar Kesultanan, bersama penari Lenggo Mbojo menjemput Penghulu Melayu di kediamannya, Kampung Melayu.

Sekitar pukul 8 pagi, rombongan Penghulu Melayu berangkat dari Kampung Melayu menuju Istana Bima. Keberangkatan rombongan tersebut ditandai dengan dentuman meriam. Rombongan yang menyertai para Penghulu Melayu secara berurutan antara lain adalah Pasukan Jara Wera sebagai pengawal pembuka jalan, diikuti oleh pasukan Jara Sarau dengan hentakan kaki kuda yang khas dan kuda pilihan, anggota Laskar Suba Nae dan Penan Sere, pasukan Pengusung Uma Lige (Mahligai), dan terakhir diikuti oleh rombongan pemuka adat Dana Mbojo.

Ketika Penghulu Melayu beserta rombongan tiba di Istana Bima, disambut pula dengan dentuman meriam dan berbagai atraksi serta tarian tradisional seperti tari kanja, tari sere, Gantao, dan dilanjutkan dengan Mihu yaitu pernyataan kesiapan sultan untuk menerima sekaligus memulai upacara penyerahan U'a Pua yang berisi Kitab Suci Al Quran.

Setelah U'a Pua diserahkan, Penghulu Melayu dan Sultan duduk berdampingan sambil menyaksikan Tari Lenggo U'a Pua sebagai lambang keharmonisan hubungan dan

simbol kesamaan Visi dan Misi masyarakat Mbojo dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Kemudian bagian akhir upacara ditandai dengan pembagian 99 tangkai bunga telur sebagai simbol Asma'ul Husna (99 sifat Allah SWT) kepada seluruh hadirin.

Perayaan U'a Pua dihajatkan antara lain untuk memuliakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, mengenang kembali sejarah masuknya agama Islam di Tanah Bima, dan sekaligus sebagai wahana penghormatan atas jasa-jasa para Penghulu Melayu beserta seluruh kaum keluarga yang telah menyebarkan agama Islam di Tanah Bima. Juga untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bima yang ditunjukkan dengan penyerahan Kitab Suci Al-Qur'an kepada Sultan sebagai pemimpin untuk dilaksanakan secara bersama-sama dengan seluruh rakyat.

### **Kampung Pandai Besi Nggaro Lo**

Kampung Nggaro Lo terletak di tenggara Kota Bima, tepatnya di kelurahan Penanae Kecamatan Raba Kota Bima. Terletak di lereng bukit Penanae, sekitar 3 kilometer dari kota Raba Bima.

Memasuki kampung ini pandangan kita tertuju pada bekas Rubu-Rubu (sejenis tempat penempaan dan perapian besi-besi dan tempat mengolah besi menjadi alat-alat pertanian atau perkakas rumah tangga seperti pacul, tombak, parang, pisau dan bahkan keris). Dinamakan Nggaro Lo, konon di lereng-tereng bukit dan sekitar kampung ini dulu terdapat banyak kebun-kebun Raja. Nggaro berarti Kebun. Lo berarti Tuan atau Raja.

Pada sekitar tahun 60-an sampai 70-an setiap hari, dari pagi hingga petang, bahkan malam hari, terdengar dentingan besi yang ditempa silih berganti disertai asap mengepul dan debu berterbangan hampir di setiap sudut kampung.

Ada sekitar 8 sampai 10 Rubu atau bengkel kerja yang ditemukan di kampung ini. Para pekerjanya sibuk menempa, memukul dengan palu, memompa, menggosok, mengampas, hingga mengukur alat-alatnya agar kelihatan lurus. Itulah aktifitas keseharian warga Nggaro Lo yang telah terwarisi turun temurun sejak masa kerajaan dan Kesultanan Bima. Namun kini suara dentingan itu sudah tidak bergema seperti dulu. Hanya tinggal 1 sampai 3 Rubu saja yang masih tetap bertahan menyapa perubahan zaman.

Pada masa kejayaan kerajaan dan Kesultanan Bima sejak abad ke-17, kampung ini merupakan pusat produksi senjata dan peralatan perang kerajaan seperti tombak, keris, parang, pedang dan perlengkapan lainnya seperti sepatu kuda, kereta, baut dan mur serta pertengkapan prajurit.

Hal itu juga berlangsung hingga memasuki masa pendudukan Jepang yang digunakan untuk membuat Samurai.

Seiring perkembangan zaman saat ini, Rubu-Rubu telah banyak beralih fungsi. Masyarakat tidak lagi memproduksi senjata, tapi sudah banyak yang menempa besi untuk kebutuhan pertanian dan perkakas rumah tangga seperti tembilang, parang, cangkul, pisau, golok, keris, pedang, tombak, parang dan sabit.

### **Pasar Tradisional**

Kehidupan dan aktifitas masyarakat Kota Bima yang masih didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, memberi pengaruh terhadap pemanfaatan pasar sebagai sentra perdagangan dari hasil ketiga sektor tersebut, sehingga fungsi pasar menjadi sangat penting bagi masyarakat guna memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, Pasar Raya Bima memiliki keunikan tersendiri, yaitu pasar yang menjual berbagai jenis produksi lokal, mulai dari berbagai jenis jajanan, makanan tradisional hingga makanan nusantara, mulai dari produksi kerajinan tangan lokal sampai pada produksi nasional, hasil-hasil pertanian dan perkebunan lokal dan nusantara, dan yang lebih unik lagi adalah lot-lot pasar yang dihuni oleh berbagai jenis produk, bahkan berbagai jenis hewan juga dipasarkan di Pasar Raya Bima.

### **Makam Raja dan Sultan Bima (Dana Taraha)**

Dana Taraha yang merupakan kompleks pemakaman Raja-Raja dan Sultan Bima. Kompleks Kuburan Dana Taraha terletak di atas sebuah bukit yang berjarak 1

kilometer dari Terminal Bus Bima. Lokasi ini dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau kendaraan dari terminal "Dara" Kota Bima dengan menyusuri jalan mendaki bukit kecil.

Di kompleks pemakaman ini terdapat Kuburan Sultan Bima Pertama yaitu Sultan Abdul Kahir, Sultan Bima Kedua yaitu Sultan Abdul Khair Sirajuddin, Sultan Nurudin yang memerintah antara 1682-1687, serta para petinggi Kesultanan Bima, antara lain Abdul Samad Ompu Lamuni yang dulunya merupakan Perdana Menteri Kesultanan Bima, para mubaliq penziar agama Islam di Bima, juga Sultan Abdul Kahir II, putra dari Sultan Muhammad Salahuddin. Keseluruhannya terdapat 21 nisan dalam kompleks Dana Taraha.

### **Museum Asi Mbojo**

Salah satu tempat yang dapat memberikan informasi serta menambah wawasan anda tentang Kerajaan dan Kesultanan Bima adalah Museum Asi Mbojo yang dulunya merupakan istana bagi Raja dan Sultan Bima.

Museum Asi Mbojo (Istana Sultan Bima) terletak di pusat Kota Bima. Di depannya terdapat sebuah tanah lapang atau alun-alun kesultanan yang dikenal dengan nama "sera suba". "Sera" berarti tanah, sementara "suba" berarti perintah. Sera Suba merupakan tanah lapang tempat para Raja memberikan perintah berkaitan dengan kepentingan rakyat dan negeri.

Istana Bima atau Museum Asi Mbojo dikonstruksi dengan campuran gaya Eropa dan Bima pada tahun 1927 oleh Mr. Obzicshteer Rehata dan selama ini dijadikan sebagai museum. Di dalamnya berisi antara lain Silsilah Tata Urutan Raja dan Kesultanan Bima, beda tata urutan kepangkatan pemerintahan, barang-barang serta pakaian adat yang digunakan pihak istana kerajaan, para prajurit, serta masyarakat pada saat itu. Beberapa barang itu ada yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga.

### **Garoso**

Antara bulan Februari hingga April, buah Garoso melimpah di Kabupaten dan Kota Bima. Pada musim-musim seperti ini para pedagang Garoso berjejer untuk menjual Garoso di sepanjang jalan dari Desa Panda hingga memasuki Kota Bima. Di pasar-pasar Bima pun bermunculan pedagang Garoso.

Garoso adalah sejenis buah Srikaya yang tumbuh di tanah berbatu, kering dan terkena cahaya matahari langsung. Tumbuhan yang asalnya dari Hindia Barat ini akan berbuah setelah berumur 3-5 tahun. Srikaya sering ditanam di pekarangan, dibudidayakan, atau tumbuh liar, dan biasanya ditemukan sampai ketinggian 800m dpl.

### **Jajanan Tradisional**

#### *Pangaha Bunga Rontu*

Pangaha Bunga adalah panganan khas Bima yang berbentuk bunga, yang dibuat dari tepung beras. Pangaha Bunga merupakan satu di antara sekian jenis makanan khas daerah Bima yang secara turun-temurun dilestarikan hingga saat ini. Sentra penghasil Pangaha Bunga untuk Kota Bima adalah Kelurahan Rontu. Umumnya kaum ibu di kelurahan ini mempunyai keahlian membuat Pangaha Bunga, dengan rasa yang gurih dan legit.

#### *Tape Ketan dan Singkong*

Tapai (sering dieja sebagai tape) adalah salah satu makanan tradisional yang dimiliki oleh hampir semua daerah di Indonesia, termasuk Kota Bima. Dalam bahasa Bima, tape disebut '*dahi*', yang terdiri atas dua pilihan bahan, yaitu singkong dan ketan.

Tapai dihasilkan dari proses peragian (fermentasi) bahan pangan berkarbohidrat, seperti singkong dan ketan.

Selain rasanya yang manis dan aroma yang memikat, tapai juga dibuat dengan beberapa warna berbeda. Warna tersebut tidak berasal dari pewarna buatan yang berbahaya, melainkan berasal dari pewarna alami. Untuk membuat tapai ketan berwarna hijau dibuat menggunakan ekstrak daun pandan.

Pembuatan tapai memerlukan kecermatan dan kebersihan yang tinggi agar singkong atau ketan dapat menjadi lunak karena proses fermentasi yang berlangsung

dengan baik. Ragi adalah bibit jamur yang digunakan untuk membuat tapai. Agar pembuatan tapai berhasil dengan baik, alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan harus bersih, terutama dari lemak atau minyak. Alat-alat yang berminyak jika dipakai untuk mengolah bahan tapai bisa menyebabkan kegagalan fermentasi. Air yang digunakan juga harus bersih; menggunakan air hujan bisa mengakibatkan tapai tidak berhasil dibuat.

Selain dapat dikonsumsi secara langsung, tapai dapat dijadikan olahan lain atau dicampur dengan makanan dan minuman lainnya. Contohnya: untuk campuran es campur, atau dapat juga diolah kembali menjadi wajik.\*\*\*

## **Ikhtisar *Pilot Projects* Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bima**

### **(Laporan Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia)**

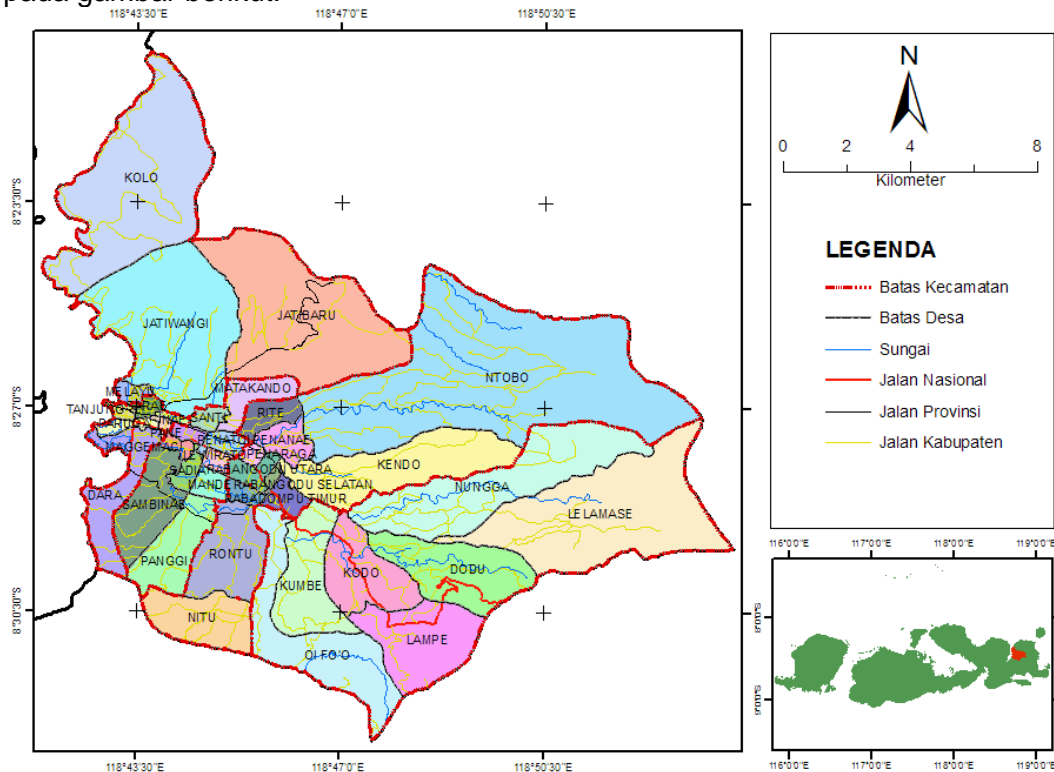
Sejak penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digaungkan pada tahun 2009, Kota Bima dijadikan sebagai salah satu *pilot project* program ini. Inisiasi *pilot project* di Kota Bima berasal dari Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) regional Bali Nusa Tenggara.

Kegiatan yang berjalan sejak tahun 2009 ini tidak hanya dimanfaatkan untuk menguji coba instrumen KLHS, akan tetapi dipergunakan juga untuk mensosialisasikan penggunaan instrumen serta membangun kapasitas internal PPLH. Sedangkan bagi Kota Bima, mendapatkan manfaat langsung dalam perbaikan perencanaan pembangunan mereka serta mendapatkan pendampingan dan alih pengetahuan dari para ahli nasional.

#### **Kondisi Umum Kota Bima**

Secara geografis Kota Bima terletak antara 118<sup>o</sup>41' – 118<sup>o</sup>48' BT dan 8<sup>o</sup>30' – 8<sup>o</sup>20' LS, dengan batas-batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dan sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bima.

Secara spasial penyebaran 5 lima kecamatan di Kota Bima dapat dilihat pada gambar berikut.



Peta Administrasi Kota Bima

#### **Landform**

*Landform* wilayah Kota Bima dapat dikelompokkan menjadi 5 landform utama yaitu *landform* Aluvial, *Landform* Marin, *landform* Vulkanik, dan *landform*

Karst. Di Kota Bima *landform Alluvial* dapat dibedakan menjadi dataran banjir (di daerah dekat pantai), dataran Alluvial (di Kota Bima), dan dasar lembah (jalur aliran sungai). Di wilayah Kota Bima *landform Marin* dibedakan menjadi dua bagian yaitu pesisir (pesisir pasir dan pesisir lumpur) dan tebing batuan. *Landform Vulkanik* menduduki wilayah yang paling luas di Kota Bima, dan secara spasial menduduki wilayah bagian utara Kota Bima. *Landform Karst* menduduki wilayah paling utara dan bagian tenggara, Kota Bima.

### **Ketinggian**

Wilayah Kota Bima dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok ketinggian tempat, yaitu ketinggian antara 0-25 m, 25-50 m dan lebih dari 50 m. Berdasarkan data Kota Bima dalam angka (2007) wilayah dengan ketinggian tempat lebih dari 50 m menduduki luasan yang paling besar, sedangkan wilayah dengan ketinggian 0-25 m yang menduduki luasan yang paling sempit.

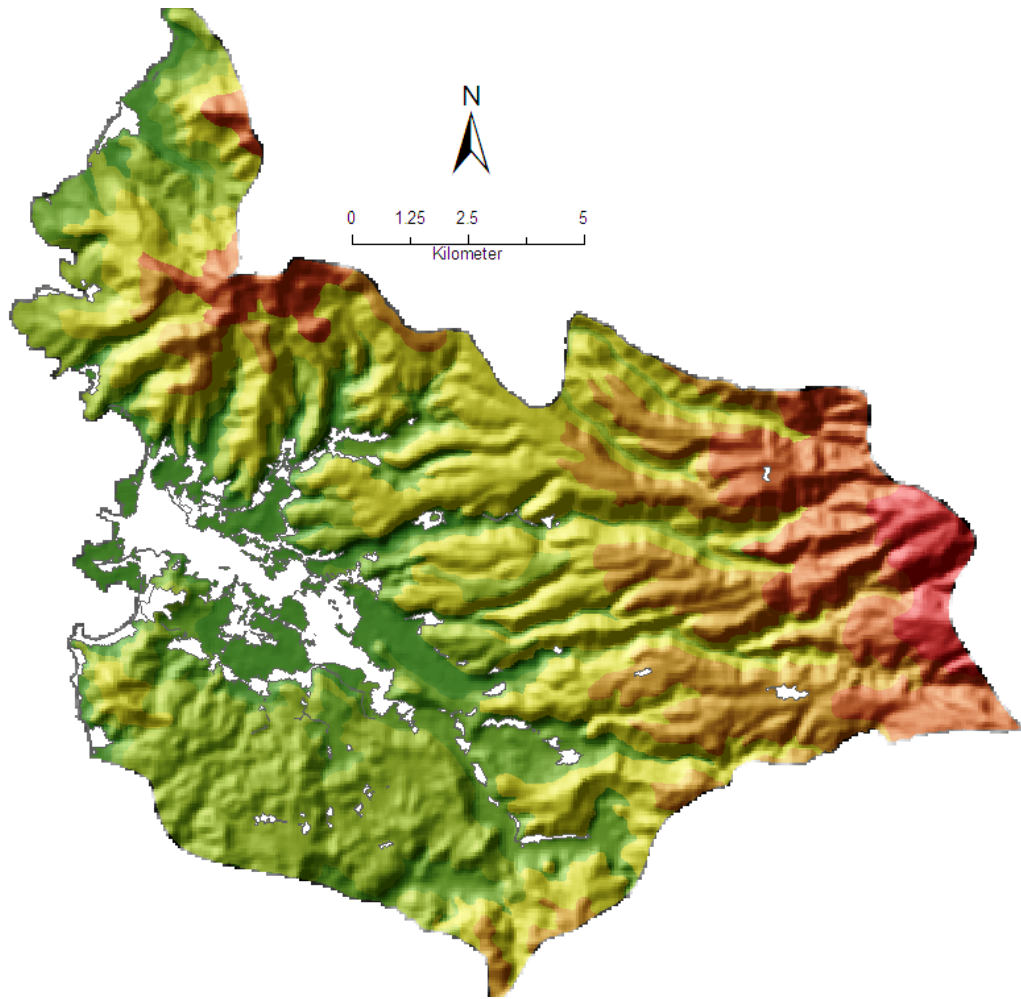
Berdasarkan data geologi dan data kedalaman efektif, kawasan Kota Bima memiliki stabilitas tanah dan geologi yang tinggi, kecuali pada daerah yang mempunyai kemiringan lereng diatas 30 %, dan, tingkat erosi rendah, resapan air tanah dangkal relatif besar serta relatif aman terhadap bencana. Dengan demikian kawasan ini potensial untuk kawasan perkotaan, terutama dengan daya dukung lahan terhadap beban kegiatan yang ada di atasnya. Kawasan seperti tersebut terutama berada di pusat Kota Bima. Dengan kondisi fisik alamiah yang sedemikian rupa dan lahannya relatif masih banyak yang kosong, memungkinkan ke depan untuk pengembangan fisik kota. Akan tetapi saat ini lahan tersebut sebagian masih berupa lahan pertanian, yang tentunya dalam pengembangan wilayah juga harus dipertimbangkan.

### **Hidrologi**

Hidrologi air permukaan pada umumnya berasal dari bendungan, dam dan sungai-sungai yang mengalir di Kota Bima. Di Kota Bima terdapat dua sungai besar yaitu sungai Sori Dodu dan Sori Na'e sedangkan sungai-sungai lain yang melewati Kota Bima adalah Sori Padolo, Sori Rontu, Sori Tambe, Sori Ntobo, Sori Nangarade dan Sori Melayu. Sungai-sungai ini sifat dan kondisinya keairannya sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, vegetasi dan batuan penyusunnya terhadap sifat air.

Selain air hujan, sumber utama lain dari air sungai ini adalah mata air. Di Kota Bima terdapat 4 sumber mata air yaitu mata air Witi yang mempunyai debit 25 liter/detik, mata air Oi Fo'o dengan debit 20 liter/detik, mata air Mada Masa dengan debit 15 liter/detik dan mata air Oi Si'i yang berdebit 2.5 liter/detik. Semua mata air ini berada di Kecamatan Rasana'e Timur yang merupakan daerah hilir dari Kota Bima. Pemanfaatan air tanah oleh masyarakat Kota Bima lebih banyak digunakan sebagai sumber air bersih untuk keperluan rumah tangga. Kedalaman air tanah, yang direpresentasikan oleh kedalaman sumur masyarakat berbeda-beda, dipengaruhi oleh keadaan topografi wilayah dan kondisi curah hujan. Pada wilayah berbukit, ke dalam air sumur pada musim hujan berkisar antara 7-12 meter, sedangkan pada musim kemarau kedalaman sumur rata-rata lebih dari 15 meter. Di wilayah dataran rendah kedalaman sumur pada musim hujan berkisar antara 4-5 meter dan pada musim kemarau kedalaman sumur antara 6-9 meter.





Topografi Kota Bima

Keterangan: yang berwarna putih adalah lokasi permukiman

Kota Bima didominasi oleh tanah-tanah yang masih muda dan peka terhadap erosi seperti jenis tanah Kompleks Mediteran Coklat dan Litosol serta jenis tanah Kompleks Litosol Mediteran Coklat Kemerahan dan Mediteran Coklat. Jenis tanah Kompleks mediteran dan Litosol merupakan tanah yang mempunyai solum tanah yang dangkal dan kurang subur untuk budidaya pertanian. Bentuk topografi yang beragam dengan tingkat kelerengan yang cukup curam juga merupakan salah satu kondisi alam yang mempengaruhi besarnya tingkat erosi tanah.

Berdasarkan hasil prediksi erosi dengan menggunakan metode USLE (*Universal Soil Loss Equation*) dan Sistem Informasi Geografi memperlihatkan bahwa di daerah-daerah timur, selatan dan utara Kota Bima mempunyai tingkat erosi aktual yang beragam, sedangkan di daerah pusat kota tingkat erosi aktual cukup seragam. Bentuk lereng dan keadaan jenis tanah sangat mempengaruhi besarnya erosi aktual di daerah pinggiran Kota Bima. Erosi-erosi aktual yang sangat tinggi terjadi di desa/kelurahan Rabadompu, desa Sambina'e dan desa Lampe.

Secara umum, kondisi alam lingkungan Kota Bima sangat dipengaruhi oleh adanya kondisi dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Musim hujan kejadiannya sangat singkat yaitu selama tiga bulan (bulan Desember sampai dengan bulan Februari), sedangkan sisanya adalah musim kemarau

yang terjadi selama 9 bulan yaitu mulai bulan Maret sampai bulan November. Musim kering yang lama, menyebabkan Kota Bima mengalami defisit air hingga 8 bulan yaitu mulai April – November. Defisit air tertinggi terjadi pada bulan (Agustus – Oktober). Hal ini terjadi karena curah hujan yang tinggi pada bulan basah (Desember–Februari) semuanya mengalir ke laut, sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali pada waktu musim kemarau.

Melalui rekayasa lingkungan seperti membuat waduk atau embung, meningkatkan imbunan air tanah dengan membuat sumur resapan dan biopori, melakukan penghijauan dan reboisasi di daerah hulu, di daerah hulu, meningkatkan luasan hutan minimal 30% pada setiap DAS yang bermuara ke Kota Bima dan penetapan hutan rakyat pada lahan pertanian dapat mengendalikan banjir dan erosi di musim hujan dan mengatasi kekeringan di musim kemarau.

### **Kependudukan**

Kota Bima dengan luas 222,25 km<sup>2</sup> mempunyai jumlah penduduk 127.373 jiwa (data tahun 2009) dengan tingkat kepadatan rata-rata 573 jiwa/km<sup>2</sup>. Namun jumlah penduduk ini tidak tersebar secara merata dan tingkat kepadatan tertinggi terjadi pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat (2.812 jiwa/km<sup>2</sup>) dan kecamatan Mpunda (1.669 jiwa/km<sup>2</sup>). Jumlah penduduk sebesar 127.373 jiwa dapat memproduksi sampah 96 m<sup>3</sup>/hari. Sampah ini tidak semuanya dapat diangkut ke TPA. Jumlah penduduk yang cukup besar selain memproduksi sampah yang cukup besar, juga memerlukan tempat permukiman dan sumber pendapatan yang memadai, hal ini menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dan degradasi hutan.

### **Kebijakan**

Kebijakan pembangunan Kota Bima dalam kurun waktu lima tahun (2003–2008) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kota Bima yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup wilayah Kota Bima adalah kebijakan fisik dan ekonomi. Di bidang fisik, kebijakan tersebut difokuskan pada sektor pemukiman, sarana dan prasarana wilayah, dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kebutuhan dasar seperti permukiman dan penyehatan lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk, serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang (fisik dan kelembagaan) untuk mengakselerasi berbagai kegiatan ekonomi lokal.

Kebijakan ekonomi Kota Bima dijabarkan ke dalam kebijakan sektor-sektor unggulan. Disektor pertanian secara umum rencana pembangunan pertanian Kota Bima diarahkan untuk pengembangan dan pemanfaatan berbagai potensi sumberdaya pertanian, kehutanan, perkebunan, dan peternakan yang berorientasi pada pengembangan agribisnis dan agroindustri agar mampu meningkatkan keunggulan kompetitif dan tetap mempertahankan keunggulan komparatif. Disamping itu, rencana pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas juga menyangkut peningkatan usaha rehabilitasi, konservasi dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebagai sistem penyangga kehidupan perkotaan.

Kebijakan pembangunan pertanian di Kota Bima terdiri dari peningkatan pelayanan saprodi dan penyuluhan bagi peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, pembuatan demplot irigasi tetes pada lahan kering dan tabulapot dan tabulakar, perlindungan tanaman dan pengamanan produksi pada lahan pekarangan, peningkatan SDM tentang tata cara pengelolaan agribisnis dan usaha tani berwawasan agribisnis (SL-UBA), dan pengembangan sentra produksi tanaman obat-obatan meliputi songga, nonu/mengkudu.

Kebijakan pembangunan di bidang perkebunan adalah pengembangan tanaman kelapa, tanaman wijen, pengembangan tanaman jahe, tanaman mangga (buah segar, buah kakeng) dan tanaman jambu mente (mente kering). Di bidang peternakan meliputi pengembangan ternak sapi bibit, ternak kambing/domba, ternak unggas (ayam, itik, bebek dan telur) serta kerbau dan kuda.

Sementara di bidang kehutanan adalah pembentukan kelompok mitra pengamanan hutan, pengendalian kerusakan hutan, peningkatan pendapatan kelompok usaha tani terpadu, peningkatan fungsi hutan sesuai peruntukannya. Kebijakan pembangunan disektor perikanan dan kelautan adalah Peningkatan peran sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan perekonomian masyarakat; Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidayaan ikan, dan masyarakat pesisir; Perlindungan dan pengawasan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan beserta ekosistemnya; Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia, aparatur, masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan; dan Pengembangan teknologi dan sistem informasi perikanan dan kelautan.

### **Struktur Pengembangan Wilayah**

Struktur pengembangan wilayah mencakup lima BWK (Bagian Wilayah Kota) yang meliputi: BWK Pusat kegiatan sebagai daerah komersial (perdagangan dan jasa) serta pelayanan umum (perkantoran dan fasilitas sosial); BWK Selatan dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan skala regional, kawasan permukiman dan jasa skala regional; BWK Utara dengan fungsi sebagai pusat kegiatan bongkar muat barang dan orang di sekitar pelabuhan Bima, perikanan, perdagangan skala lokal hingga regional dan kegiatan industri menengah dan pergudangan; BWK Timur dengan fungsi sebagai kawasan pertanian, pertambangan, perikanan darat, permukiman dan perdagangan skala lokal serta transportasi skala lokal; dan BWK Tenggara dengan fungsi sebagai kawasan pertanian, permukiman dan perdagangan skala lokal serta transportasi skala lokal.

Rencana sistem transportasi jalan raya terdiri atas rencana sistim jaringan jalan, rencana sirkulasi, rencana angkutan umum dan rencana pengembangan terminal. Rencana sistem jaringan jalan meliputi pengembangan jalan lingkaran (*ring road*) yang terdiri dari jalan lingkaran Utara–Barat, jalan lingkaran Utara–Timur, jalan lingkaran Timur–Selatan dan jalan lingkaran Barat–Selatan serta pengembangan jalan lintas utara Pulau Sumbawa yang melintasi Kota Bima melalui peningkatan akses yang berbatasan dengan Kecamatan Wera Kabupaten Bima melalui Kelurahan Melayu dan Kolo; Rencana sirkulasi disesuaikan dengan rencana jaringan jalan lingkaran luar; Rencana angkutan umum diarahkan untuk dapat melayani jalur-jalur utama kota dan dapat mencapai berbagai lokasi utama kota.

Rencana pengembangan terminal diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan penumpang dan barang skala pelayanan lokal, regional dan nasional yang berlokasi di Kelurahan Paruga. Rencana sistem transportasi laut Kota Bima meliputi pelabuhan bongkar muat dan pelabuhan penumpang; Pelabuhan bongkar muat untuk jalur distribusi barang kearah pulau Sulawesi, Kalimantan dan NTT, untuk komoditi wilayah Kota Bima; Pelabuhan penumpang diarahkan pada pengaturan waktu penyeberangan jenis kapal dan jenis kendaraan; dan Pengembangan pelabuhan rakyat diarahkan pada kegiatan penataan kualitas kawasan dermaga beserta fasilitas pendukungnya.

Pengembangan jaringan listrik berupa, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang diarahkan pada Kecamatan Asakota Kota Bima; Pembangunan Gardu Induk dan jaringan tegangan tinggi/SUTT.

Rencana pengembangan jaringan penyediaan air minum berupa pengembangan sumber-sumber mata air, pengembangan sistem jaringan air bersih dan peningkatan kualitas air minum/bersih; Rencana pengembangan jaringan *drainase*, berupa pengembangan saluran pembuangan air hujan dan pembuangan limbah rumah tangga; membangun sumur resapan pada tiap kawasan pemukiman; Pengembangan saluran pembuangan limbah rumah tangga dengan pengadaan saluran *drainase* di kirikanan jalan pada kawasan terbangun.

Pola Ruang untuk kawasan lindung, yaitu mempertahankan Kawasan-kawasan resapan air; kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan seperti Istana Raja dan Masjid Sultan Salahuddin; Sempadan Pantai; Sempadan Sungai; Kawasan ruang terbuka hijau; Kawasan Rawan Bencana; Kawasan Bakau. Pola ruang kawasan budidaya, yaitu meliputi kawasan terbangun dan tidak terbangun. Kawasan terbangun yang diarahkan di luar BWK Pusat, terutama di BWK Utara; pembatasan kegiatan terbangun dan secara bertahap dilakukan pembebasan lahan disekitar bantaran sungai.

Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yaitu kawasan perdagangan campuran meliputi usaha garment/konveksi, elektronik, *dealer* motor, biro perjalanan, jasa perbankan; Pusat pembelanjaan berupa pasar raya, plasa, pasar swalayan yang diarahkan pada sekitar BWK Pusat; Pasar Lingkungan lokasinya menyebar merata di Kota Bima, Pedagang Kaki Lima diarahkan pada lokasi-lokasi yang mempunyai aksesibilitas yang tinggi. Rencana pengembangan kawasan wisata berupa pengembangan obyek wisata belanja, wisata olahraga dan wisata alam.

Rencana pengembangan kawasan industri berupa Rencana pengembangan kawasan industri dan pergudangan. Rencana pengembangan kawasan pertanian berupa Kawasan pertanian yang dipertahankan secara mutlak; Kawasan pertanian lahan kering yang memungkinkan untuk pengembangan kawasan terbangun di Kelurahan Kolo, Jatiwangi, Jatibaru dan sebagian Kelurahan Santi; Memanfaatkan lahan pertanian produktif yang ada di sekitar pusat kota atau kawasan pertanian yang berada pada area yang merupakan arah kecenderungan perkembangan kota, seperti di sekitar kawasan jalan Gatot Subroto.

### **Sosial Budaya**

Dari sisi sosial budaya, Bima mendekatkan penghuninya pada kehidupan yang esoteris bahkan transeden. Tradisi Islam yang kuat menjadi mesin pendorong pada orang Bima untuk menjadi orang-orang tangguh, ulet dan punya karakter. Dalam sejarah Bima peranan ulama sangat menentukan. Mereka menjadi bagian penting dari lembaga kerajaan. Nasehat para ulama menjadi salah satu dasar keputusan raja. Kehidupan sosial budaya dan religius di daerah ini sangat berjalan harmonis dan rasa saling hormat menghormati atas keyakinan yang berbeda sangat tinggi. Berdasarkan data statistik tahun 2007, sebanyak 97,82 % dari penduduk Kota Bima adalah beragama Islam dan hanya sekitar 2 % beragama yang lain seperti Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.

### **KLHS dan Pengambilan Keputusan**

Kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bima adalah menggunakan KLHS dalam rangka pengayaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, terutama untuk mengetahui masalah lingkungan hidup

yang paling menonjol di Kota Bima, mengetahui penyebab terjadinya masalah lingkungan hidup di Kota Bima, mengetahui sudah terintegrasi tidaknya masalah lingkungan dalam kebijakan, rencana dan program serta merumuskan alternatif kebijakan rencana dan program yang dapat diusulkan dalam menangani masalah lingkungan tersebut.

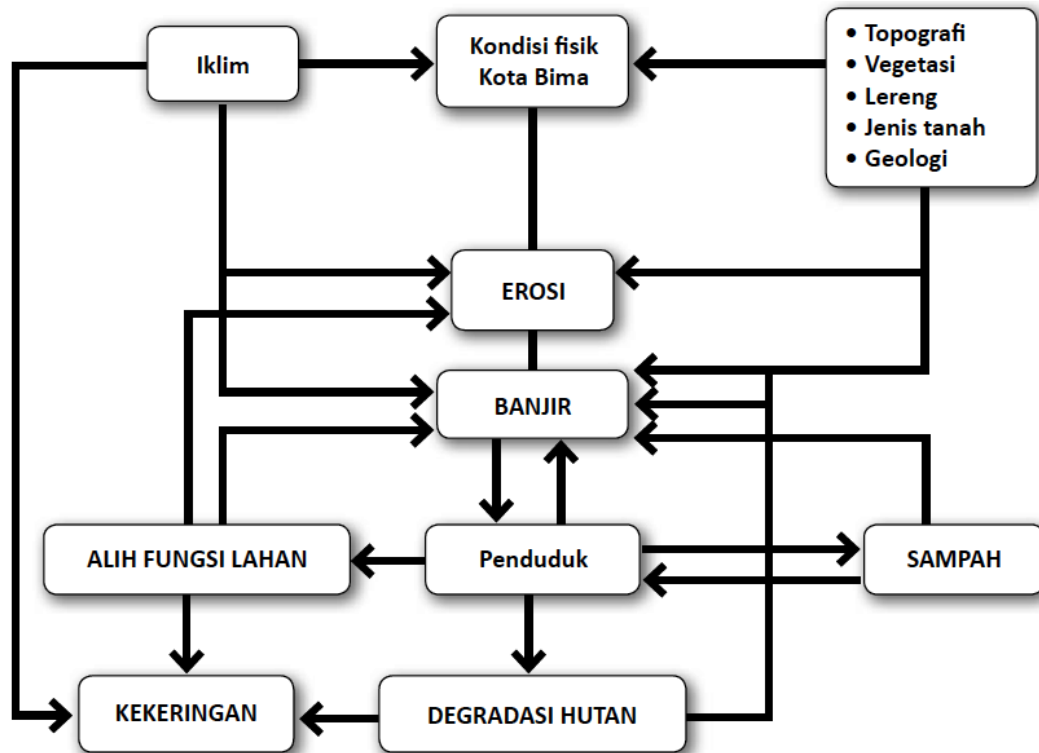
Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh institusi Bappeda dan BLH Kota Bima bersepakat akan memanfaatkan hasil KLHS sebagai bahan dan sarana pendukung pengambilan keputusan; mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas masalah-masalah yang ada di Kota Bima; mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi; basis untuk tata pengaturan yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi serta memfasilitasi kerja sama lintas batas untuk mencegah konflik berbagai pemanfaatan sumber daya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

Dukungan dari *Environmental Support Program* (ESPDANIDA) adalah tim *coaching* kepada konsultan lokal yang telah dikontrak oleh Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) regional Bali dan Nusa Tenggara, staff PPLH Regional Bali dan Nusa Tenggara, Bappeda dan BLH Kota Bima. *Coaching* dilakukan melalui kehadiran tenaga ahli dalam 2 kali *workshop*. Pada kunjungan pertama, tim *coaching* memberikan ilustrasi langkah-langkah KLHS dan menapis isu strategis. Kunjungan kedua dimaksudkan untuk memberikan *review* atas hasil KLHS tim lokal.

#### **Permasalahan, Kerangka Pikir dan Metode**

Dalam penyusunan studi, tim melakukan *desk study* terhadap: a) data primer (*Landform*, Erosi & banjir, kekeringan); b) data sekunder (Bima Dalam Angka, PDRB Peta Rupa Bumi, Geologi, Tanah); dan c) KRP (Rencana Tata Ruang, Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Rencana Strategis); mendapatkan permasalahan strategis berupa banjir, erosi, kekeringan, alih fungsi lahan, degradasi hutan, dan sampah.

Hubungan antara masalah yang satu dengan masalah yang lainnya dapat dilihat pada gambar berikut.



### Pelingkupan Berdasarkan Geologi

Metoda lain yaitu pelingkupan berdasarkan kondisi lingkungan geologi, yang ditunjukkan tim *coaching* memberikan dimensi lain dalam KLHS Kota Bima. Kota Bima terletak di lembah, pedataran aluvial; terletak pada endapan Alluvial, batuan gunung api (pliosen), batugamping (miosen), batuan gunung api (miosen). Secara umum, dengan kondisi geologi tersebut, Kota Bima mempunyai potensi air yang kurang bagus kuantitas dan kualitasnya. Dari kuantitas, kondisi umumnya intensitas curah hujan sedang dan kecil, debit sungai di musim kemarau kecil dikarenakan *base flow* kecil, sehingga air tanah menjadi sumber air strategis.

Bila melihat secara spesifik fungsi ekonomis Kota Bima, sedimentasi di Teluk Bima akan menjadi salah satu masalah strategis lainnya untuk Kota Bima. Muara yang sempit serta bentuk sedimentasi atau aliran air yang menyerupai pita terbentuk alami sepanjang garis pantai di teluk Bima. Bentuk teluk (memanjang dan sempit) dan pola pembentukan sedimentasi dan genangan di Kota Bima (*long-shore current*- arus sepanjang panjang, yang ada di depan (teluk Flores) tidak bisa menyebarkan endapan) akan memicu terjadinya sedimentasi lebih cepat di Teluk Bima.

Mudahnya pembentukan sedimentasi di teluk Bima akan mengganggu aktivitas di Pelabuhan Bima dan transportasi laut, dan juga akan mengganggu kegiatan usaha perikanan, kelautan dan penambangan garam. Selain itu, juga akan mengganggu rencana pengembangan wisata Kota Bima khususnya pengembangan kawasan wisata pantai. Secara gamblangnya, seiring waktu, sedimentasi di Teluk Bima akan mengganggu kegiatan pengembangan ekonomi di Kota Bima, atau bahkan akan mengganggu keberadaan Kota Bima.

Upaya mitigasi yang bisa dilakukan adalah pengelolaan wilayah dengan penetapan zona budidaya untuk mengurangi terbentuknya sedimentasi maupun zona rawan gelombang pasang, untuk menghindari dampak bahaya yang disebabkan. Keduanya membutuhkan upaya bersama dan kerjasama antar

daerah antara Kota Bima dan Kabupaten sekitar. Contoh-contoh kegiatan mitigasi yang dapat dilakukan misalnya di kawasan hutan dilakukan reboisasi dan membuat kebun talun (campuran), sedang di luar hutan memperbanyak kebun talun.

Permasalahan utama yang dapat diangkat dari metoda penapisan berdasarkan data geologi memperkuat proses penapisan yang dilakukan oleh konsultan yaitu kestabilan kuantitas dan kualitas sumber daya air, banjir, dikarenakan pedangkalan muara dan delta kecil serta adanya genangan air asin yang disebabkan gelombang pasang laut.

### **Proses Partisipasi Publik**

Dari konsultasi publik yang dihadiri oleh *multistakeholder* di Kota Bima, SKPD maupun LSM yang dilibatkan menanggapi hasil studi yang ada sekarang masih dalam ranah teknis saja, studi ini masih perlu diperkaya dengan melakukan kajian terhadap implikasi KRP maupun kebijakan payung (visi, misi) terhadap kebutuhan dasar masyarakat dan nilai-nilai sosial. Apabila memungkinkan, juga memasukkan kajian mengenai model mekanisme insentif yang bisa diterapkan khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas di daerah konservasi.

Dari ilustrasi sisi waktu maupun besaran yang diakibatkan oleh perubahan iklim (terutama banjir dan ketersediaan air), LSM juga merasa perlu untuk memasukkan ruang lingkup alternatif KRP dalam mitigasi perubahan iklim dengan mempertimbangkan secara serius aspirasi masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai subyek tidak hanya obyek. Dinas Pertanian mengharapkan memasukkan rekomendasi penyeleksian jenis kegiatan pertanian yang sesuai dengan karakteristik alam Kota Bima.

### **Rekomendasi**

Untuk melanjutkan proses KLHS setelah proses penapisan dilakukan, rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bima adalah sebagai berikut:

- Dari sisi kelembagaan, keterlibatan pemerintah daerah diharapkan lebih aktif. Pembentukan tim KLHS lokal yang ditunjuk oleh Kepala pemerintah diharapkan bisa menginternalisasi KLHS ke dalam kegiatan rutin pemerintahan daerah.
- Dari sisi metodologi perlu dilanjutkan dengan melakukan *overlaying* skenario KRP program-program pemerintah daerah Kota Bima (apa yang akan dibangun) dan dimana akan dibangun (RTRW) melalui pendekatan rasional. Dengan demikian, orientasi dan implikasi KRP terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Bima sudah dapat diilustrasikan.\*\*\*

## Mewujudkan Kebersihan dan Keindahan Kota

Dalam upaya meraih piala Adipura, Kota Bima terus ditata dan dibenahi, terutama dengan menggiatkan kegiatan gotong royong masyarakat.

### **Kota Sehat dan Bersih**

Pada tanggal 12 November 2011, Walikota melakukan *Launching* Kampanye Kota Bima Bersih, yang ditandai dengan konvoi motor sampah. Sebanyak 32 unit motor pengangkut sampah diserahkan secara simbolis oleh Walikota kepada Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman, Ir. Hj. Zaenab. Motor-motor ini didistribusikan ke kelurahan-kelurahan yang mempunyai tingkat kepadatan sampah yang tinggi.

Kota Bima juga memperoleh penghargaan sebagai salah satu Kota Sehat Nasional pada tahun 2012. Pemerintah Kota Bima pun telah membentuk Forum Kota Sehat yang akan mengoptimalkan kinerja SKPD terkait sekaligus menggerakkan peran serta masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

### **Program Seribu Taman**

Program Seribu Taman ditujukan untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta menciptakan pemandangan yang indah dipandang. Keberadaan taman kota ini tentu akan mempercantik tatanan kota. Masyarakat Kota Bima menyambut positif dan sangat senang dengan pembangunan taman kota ini.

Pada awal tahun 2012 ini Pemerintah Kota Bima masih melanjutkan pembangunan taman kota yang masih belum selesai serta membangun taman kota yang baru. Seperti pembangunan taman kota yang dilakukan di sebelah selatan Lapangan Pahlawan Raba Kelurahan Rabadompu Barat. Setelah pada tahun 2011 selesai melakukan pembangunan taman kota disebelah utara, kini di tahun 2012 mulai dilakukan pembangunan taman kota di sebelah selatan Lapangan Pahlawan.

### **Lomba Kelurahan Tk. Nasional**

Pada ajang Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi NTB pun Kota Bima kerap menuai prestasi.

Pada tahun 2012, Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba meraih juara pertama pada tingkat Provinsi dan berhak mewakili NTB pada tingkat nasional.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 414.8.5222/PMD, tertanggal 1 Agustus 2012, Kelurahan Rabangodu Utara dinyatakan masuk 6 besar nasional dan berhak mengikuti lomba lanjutan untuk mencari juara 1 tingkat nasional yang dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 10 Agustus 2012.

Pada tahap penilaian ini Kelurahan Rabangodu Utara melaksanakan pemaparan mengenai gambaran umum kelurahan atau desa, program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan dua tahun terakhir, keunggulan yang dimiliki kelurahan, inovasi yang telah dilakukan, program pembinaan pasca perlombaan kelurahan, hambatan dan tantangan serta solusi yang ditawarkan kelurahan.

Dari hasil penilaian, Kelurahan Rabangodu Utara berhasil meraih Juara Harapan Satu pada ajang Lomba Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2012.\*\*\*



## Analisis Isu dan Strategi Pembangunan Kota Bima

### Analisis Isu Strategis

Isu-isu strategis yang melingkupi pertumbuhan pembangunan Kota Bima beberapa tahun terakhir antara lain adalah lahan kota yang akan semakin berkurang, sehingga tidak memungkinkan untuk dikembangkan berbagai penggunaan lahan baru. Keterbatasan lahan di pusat kota akan membuka implikasi kepada pengembangan lahan terbangun di pinggiran kota.

Kota Bima memiliki keunikan wilayah dibandingkan dengan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia. Sebagai kota otonom, Kota Bima memiliki keunikan tersendiri karena masih memiliki hutan lindung, ada lahan sawah berkelanjutan, serta ada potensi tambang marmer dan batu galena. Oleh sebab itu, secara umum isu-isu strategis di Kota Bima berkaitan dengan pusat kota yang sudah semakin berkembang dengan berbagai permasalahan di dalamnya, serta daerah pinggiran yang masih memiliki banyak lahan kosong atau lahan produktif yang menuntut untuk dikembangkan.

#### Wilayah Kota Kurang Berkembang

Pertambahan penduduk dan perkembangan aktivitas kota menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang yang ditunjukkan dengan semakin meluasnya wilayah terbangun di berbagai pelosok kota dan semakin tingginya kepadatan penduduk di beberapa bagian kota.

Secara fisik, kota akan tumbuh ke daerah-daerah pinggiran di sekitarnya. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Bima pada dekade terakhir ini mengakibatkan peningkatan kebutuhan lahan di daerah pusat kota.

Daerah perkotaan mengalami pertumbuhan yang sporadis di berbagai tempat. Salah satu alternatif untuk memecahkan masalah ketidakmerataan kepadatan penduduk, kemiskinan, dan keterbelakangan di daerah ini adalah dengan mengembangkan sub pusat pelayanan dengan fasilitas penunjangnya.

Kendala yang dihadapi pada saat ini adalah belum adanya akses yang baik, terutama dalam hal pengembangan jalan tembus yang menghubungkan ruas jalan utama dengan pusat-pusat lingkungan.

#### Isu Pengembangan Wilayah

Isu pengembangan wilayah Kota Bima adalah bagaimana mengembangkan wilayah kota yang saat ini merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Dengan demikian, pengembangannya perlu mempertimbangkan kedudukan Kota Bima dalam lingkup nasional dan regional.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa isu pengembangan di Kota Bima, yaitu: (1) Pengembangan konsep Kota Tepian Air di sepanjang pantai di kecamatan Rasanae Barat; dan (2) Pengembangan Kota Bima yang mengarah sebagai kota perdagangan dan jasa, kota pendidikan serta industri.

#### Isu Lingkungan

Isu lingkungan di Bima berkaitan dengan penggunaan lahan pada kawasan-kawasan tertentu yang tidak sesuai dengan kaidah pelestarian lingkungan. Demikian juga dengan pengembangan dan pembangunan yang banyak dilakukan akhir-akhir ini.

Beberapa isu lingkungan yang saat ini dihadapi adalah:

1. *Konversi Lahan Pertanian*

Terjadi konversi lahan pertanian di kawasan-kawasan kota maupun pinggiran kota karena kebutuhan lahan yang terus meningkat.

2. *Penggunaan Lahan di Sepanjang Sempadan Sungai dan Pantai*

Selain mengikuti pola jaringan jalan, penduduk secara umum mendirikan bangunan (permukiman) di sepanjang sungai dan pantai. Hal ini terkait dengan masalah ekonomi dan geografi wilayah. Sungai dan pantai merupakan sumberdaya alam (SDA) yang tersedia, sehingga penduduk cenderung memenuhi kebutuhan dengan

bergantung pada potensi alam. Penggunaan lahan di sepanjang sungai dan pantai tidak hanya untuk permukiman, tetapi juga untuk prasarana irigasi.

3. *Permukiman Kumuh*

Permukiman kumuh di Kota Bima banyak terlihat di kawasan pantai, sepanjang aliran sungai dan di kawasan pusat kota sekitar pusat perdagangan dan jasa, yaitu di Kelurahan Sarae, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Melayu, Kelurahan Paruga, Kelurahan Dara.

4. *Rawan Genangan/Banjir*

Topografi Kota Bima adalah datar dan berbukit, dilalui oleh 3 sungai besar. Kebiasaan penduduk yang bermukim di sepanjang aliran sungai adalah membuang limbah rumah tangga (domestik) langsung ke sungai dan anak-anak sungai, sehingga selain tercemar, kondisi sungai juga dipenuhi oleh sampah (terutama sampah anorganik, seperti plastik dan kemasan makanan). Kondisi ini sangat berpotensi meluapkan air sungai ketika musim penghujan tiba, sehingga menimbulkan genangan dan banjir.

Meluapnya air (banjir) hingga ke jalan dan permukiman penduduk sangat mengganggu aktivitas dan berimbas pada prasarana lainnya, yaitu jalan. Aspal yang sangat rentan terhadap air, harus tergenang oleh banjir dalam waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan beberapa ruas jalan berada dalam kondisi rusak.

Lokasi yang paling rawan banjir berada di Kelurahan Melayu, Kelurahan Sarae, Kelurahan Nae, Kelurahan Paruga, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Dara, Kelurahan Jatiwangi, dan Kelurahan Jatibaru.

### **Isu Sosial-Ekonomi**

Isu-isu sosial-ekonomi di Kota Bima secara umum hanya berputar pada aspek sumberdaya alam (SDA) yang akan diolah, sumberdaya manusia (SDM) sebagai tenaga pengolah, dan tingkat kesejahteraan sebagai hasil dari kegiatan ekonomi.

Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan masalah ini antara lain adalah:

- 1) Kawasan-kawasan yang mengelola SDA, khususnya pertanian dan perikanan, mengalami kontradiksi antara ketersediaan SDA dengan tingkat kesejahteraan penduduknya (tingginya angka kemiskinan);
- 2) Kurangnya kegiatan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) pada fase praproduksi – produksi - pasca produksi serta kurangnya kegiatan pengolahan lanjutan yang mengakibatkan tidak berkembangnya tenaga terampil, kurangnya tenaga kerja, serta rendahnya diversifikasi pekerjaan. Maka tak heran bila Kota Bima hanya mampu sampai tingkat distribusi pemasok bahan mentah;
- 3) Potensi SDA yang tersedia tidak didukung oleh kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang memadai, sehingga potensi yang ada kurang dikelola dengan baik dan ditingkatkan potensinya;
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi di dalam proses produksi ekonomi belum berjalan dengan optimal dan masih menerapkan pola-pola yang sederhana;
- 5) Sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata masih belum dikelola secara optimal; dan
- 6) Berkembangnya sektor informal, seperti PKL di ruas-ruas jalan utama kota.

### **Utilitas Perkotaan**

Beberapa isu yang berkaitan dengan utilitas di Kota Bima terutama yang berkaitan dengan air bersih, drainase, listrik, telekomunikasi, dan persampahan atau sistem sanitasi. Isu mengenai utilitas kota ini saling berkaitan satu sama lain, yaitu antara sistem drainase kota dengan sistem persampahan dan sanitasi.

1. *Air Bersih*

Beberapa wilayah Kota Bima masih kekurangan air bersih karena sistem perpipaan air PDAM yang kadang-kadang kurang lancar dan ada area yang belum terlayani oleh PDAM.

PDAM yang sumber airnya ada di Kota Bima dan aset-asetnya ada dalam wilayah administrasi Kota Bima tidak dikuasai dan dikelola oleh Kota Bima tapi masih dikelola oleh Daerah Otonom lain yaitu Kabupaten Bima.

Minimnya hidran umum khususnya di kawasan permukiman dan perumahan.

2. *Drainase*

Kondisi sungai-sungai besar di Kota Bima yang berfungsi sebagai drainase alami merupakan "Tempat Pembuangan Akhir (TPA)" bagi rumah tangga dan beberapa industri kerajinan dalam membuang limbah, sehingga kondisi sungai tercemar dan meluap di kala musim hujan.

Kondisi drainase buatan juga tidak optimal dengan sistem yang berakhir pada drainase utama (sungai) tanpa adanya pemisahan limbah terlebih dahulu. Saluran pembuangan rumah tangga langsung mengarah ke drainase-drainase buatan yang ada di sepanjang jalan.

### 3. Listrik

Suplai listrik yang masih rendah dibandingkan dengan tingkat permintaan penduduk baik untuk kegiatan rumah tangga, ekonomi, maupun sosial.

Minimnya prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) pada kawasan-kawasan rawan kecelakaan dan rawan kriminalitas.

### 4. Persampahan (Sanitasi)

Minimnya sarana pembuangan sampah yang memadai, terutama di kawasan permukiman, sehingga masyarakat Kota Bima banyak memanfaatkan lahan-lahan kosong dan sungai sebagai tempat membuang sampah.

Belum tersedianya sarana pembuangan sampah secara optimal di tempat-tempat umum, seperti di kawasan perdagangan dan jasa dan taman kota. Sarana persampahan yang ada pun tidak dipisahkan sesuai dengan jenisnya (misalnya bak untuk sampah organik dan anorganik).

Sistem pengelolaan sampah yang belum berjalan lancar dan belum jelas, mulai dari pengangkutan dari permukiman penduduk atau perdagangan dan jasa hingga menuju ke lokasi TPA.

## Transportasi Perkotaan

Beberapa masalah transportasi adalah pergerakan terpusat di tengah kota dan beberapa masalah lain, di antaranya: (1) Keterbatasan lahan parkir, terutama pada kawasan perdagangan dan jasa di pusat kota serta kawasan pendidikan menyebabkan kendaraan cenderung diparkir pada badan jalan; (2) Penyediaan rambu-rambu khusus pada kawasan-kawasan yang termasuk daerah bangkitan, seperti pendidikan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran cukup kurang dengan penempatan yang kadang tidak terlihat; (3) Keterbatasan rute yang menyulitkan pergerakan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas; (4) Ketidakteraturan rute dan parkir serta manajemen pengelolaan kendaraan tradisional (benhur); serta (5) Fasilitas terminal angkutan umum dirasakan masih kurang mendukung karena lokasi terminal yang terletak di tengah kota.

## Isu Struktur Ruang Kota

Isu-isu struktur ruang wilayah Kota Bima akan berkaitan dengan fungsi dan perannya, baik secara internal maupun eksternal, yaitu: (1) Kota Bima sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam RTRW Provinsi NTB serta sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) ekonomi; (2) Berdasarkan visi dan misi pengembangan Kota Bima sebagai kota pendidikan, dan perdagangan dan jasa, maka hal ini belum dapat direalisasikan secara maksimal karena belum sesuai dengan fungsi dan peran kota; (3) Kurang berkembangnya kawasan lain karena terjadi kesenjangan kelengkapan fasilitas yang mengakibatkan terkonsentrasinya kegiatan hanya di pusat kota saja. Fenomena yang sering terjadi khususnya pada daerah adalah banyak terjadi ketimpangan yang berakhir pada kesenjangan perkembangan perkotaan; serta (4) Tidak adanya kejelasan struktur dan ruang yang belum kompatibel dengan jaringan prasarana kawasan dan pergerakan sirkulasi kota.

## Strategi Pembangunan

### Analisis Strategi

Pembangunan Kota Bima terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang antara lain ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, ketersediaan sarana prasarana.

Kota Bima memiliki potensi sebagai kekuatan untuk pembangunan daerah. Letak geografis Kota Bima sebagai pintu masuk arus perdagangan Pulau Sumbawa sebelah timur melalui pelabuhan laut menjadikan Kota Bima sebagai pusat koleksi dan distribusi, pusat perdagangan dan pusat pelayanan jasa. Semakin berkembangnya aktifitas perekonomian akan menjadikan daya tarik Kota Bima untuk mencari lapangan kerja tidak hanya bagi penduduk Kota Bima dan sekitarnya tapi juga dari wilayah yang lebih luas.

Penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat merupakan prioritas dalam pembangunan Kota Bima. Untuk itu menjadikan Kota Bima sebagai kota pendidikan dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi dan penguatan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang maju dan mandiri merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Bima.

Kebijakan pembangunan ekonomi dibarengi dengan pembangunan kesejahteraan diarahkan pada penguatan struktur perekonomian daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Orientasi kebijakan pembangunan ekonomi tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi namun harus selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus mempunyai dampak yang luas pada kesejahteraan masyarakat dalam peningkatan daya beli, lapangan pekerjaan, peningkatan akses pendidikan, akses kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan ekonomi lokal hendaknya lebih diprioritaskan dalam arah kebijakan ekonomi, di mana sektor-sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap pembentukan ekonomi daerah dan mempunyai dampak ikutan yang luas lebih diarahkan dalam kebijakan ekonomi. Empat sektor utama memiliki kontribusi besar terhadap struktur perekonomian Kota Bima sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam kebijakan ekonominya, karena sektor-sektor tersebut juga memiliki proporsi tenaga kerja yang besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Bima.

### **Strategi Pembangunan Kota Bima**

Strategi pembangunan Kota Bima untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana yang diharapkan dalam visi dan misi kepala daerah dalam kurun waktu 2008 – 2013 adalah:

#### **1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan**

Salah satu sumberdaya yang penting dalam pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan tidak dapat dipungkiri merupakan usaha dalam rangka mencapai manusia yang berkualitas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual. Peningkatan kualitas SDM adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan manusia itu sendiri sehingga menjadi modal dasar pembangunan yang kuat. Demikian juga dengan pentingnya kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Pelayanan kesehatan yang baik perlu diberikan untuk memberikan masyarakat akses akan kesempatan memperoleh kesehatan.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan akses dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi melalui pembangunan, pemerataan pemanfaatan berbagai fasilitas pendidikan, peningkatan standar pelayanan minimum.
- b. Pembangunan Universitas Negeri di Bima dan mendukung pemberdayaan Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang lebih luas kepada masyarakat Kota Bima dan sekitarnya.
- c. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme melalui penyediaan beasiswa untuk pendidikan lanjutan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga

- kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal yang pada akhirnya mampu menghasilkan siswa yang berkualitas.
- d. Peningkatan mutu, infrastruktur kesehatan, distribusi dan keterjangkauan pelayanan kesehatan termasuk pembiayaan, sumberdaya dan manajemen kesehatan serta penerapan standar pelayanan minimum untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bima.
  - e. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pemberian insentif dan penyediaan beasiswa untuk pendidikan lanjutan.

## **2. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal**

Pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah antara lain dapat dicapai dengan memperkuat perekonomian yang berbasis keunggulan daerah, menciptakan keunggulan kompetitif dan membangun keterkaitan antara sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya pelayanan jasa. Dalam strategi ini masyarakat sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan dilihat sebagai potensi pembangunan yang memiliki sumberdaya untuk menggerakkan pembangunan. Setiap peluang dimanfaatkan untuk menghadapi persaingan global yang semakin berat.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi yang kuat, peran usaha mikro, kecil dan menengah perlu mendapat perhatian dan pemberdayaan dari pemerintah dalam rangka menciptakan keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan dalam persaingan dengan usaha-usaha yang lebih besar. Hal ini juga mempertahankan kesempatan kerja yang tersedia dari kegiatan UMKM tersebut.

Arah Kebijakan:

- a. Penguatan institusi perekonomian rakyat, lembaga-lembaga pengembangan ekonomi lokal dan lembaga ekonomi mikro dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tahan daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah .
- b. Menciptakan keunggulan daya saing Kota Bima sebagai kota perdagangan dan jasa dengan meningkatkan keterpaduan antara sistem produksi dan distribusi yang berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat.
- c. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, pemberian paket insentif dan pembangunan sarana prasarana perekonomian dalam rangka mendukung Kota Bima sebagai kota perdagangan dan jasa.
- d. Penetapan kawasan produksi pertanian abadi dan pengembangan sistem agribisnis untuk mempertahankan produk pertanian sebagai komoditas unggulan Kota Bima.

## **3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang**

Kebutuhan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan daerah dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang diperlukan dalam kehidupannya. Ketimpangan pembangunan kota dan desa yang terjadi selama ini antara lain adanya kesenjangan infrastruktur di antara keduanya. Konsentrasi pembangunan yang terpusat di kota menjadikannya memiliki infrastruktur yang lengkap yang menjadi daya tarik bagi penduduk untuk mendiaminya, sementara akses transportasi yang terbatas ke wilayah perdesaan menjadikan mobilitas berbagai sumber daya ke wilayah perdesaan menjadi terbatas.

Pengembangan wilayah melalui penataan ruang diharapkan dapat pemeratakan pembangunan melalui alokasi ruang yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing wilayah. Keterkaitan fungsional antar wilayah akan menjadikan antar wilayah memiliki keterkaitan untuk dapat menjalankan peran yang dimilikinya.

Arah Kebijakan :

- a. Pembangunan jaringan jalan dalam rangka pengembangan wilayah, membuka keterisolasian, peningkatan distribusi barang dan jasa dan mendukung pengembangan sektor – sektor unggulan daerah.

- b. Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar akan air bersih yang layak dan sehat.
- c. Pengembangan terminal sebagai titik pergantian moda dan naik turunnya penumpang dalam kota dan luar kota/daerah.
- d. Perencanaan tata ruang dalam rangka pengembangan wilayah untuk menciptakan keterpaduan antar sektor dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.
- e. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

#### **4. Pengembangan kehidupan masyarakat yang agamis**

Nilai-nilai agama perlu mendapat perhatian dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi semakin derasnya pengaruh dunia akibat mudahnya keterbukaan akses akan informasi. Nilai-nilai agama juga dipandang penting dalam sebagai penuntun perilaku kehidupan dan acuan norma masyarakat. Pendalaman pemahaman agama dapat mengantarkan masyarakat yang memiliki nilai moral yang tinggi sehingga mampu menghadapi permasalahan kehidupan.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati melalui peningkatan kesadaran, pemahaman, pendalaman dan pengamalan keagamaan.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

#### **5. Penguatan Kelembagaan Pemerintah untuk Muwujudkan Kota Bima yang Bertata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Tuntutan akan pelayanan prima harus mendapat respon dari pemerintah dalam rangka menciptakan pemerintahan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Proses pembangunan menuntut transparansi dan akuntabilitas sampai ke tingkat pemerintahan yang terendah. Sementara itu komponen-komponen yang ada di masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan untuk lebih mendayagunakan hasil pembangunan yang lebih memenuhi aspirasi mereka.

Arah Kebijakan :

- a. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Penguatan kelembagaan di tingkat lokal melalui pendelegasian sebagian kewenangan walikota kepada camat dan lurah, pengalokasian dana pembangunan di setiap kelurahan.
- c. Pemberdayaan lembaga-lembaga swadaya dan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan kelompok perempuan dalam proses pembangunan.

Strategi-strategi yang telah ditetapkan tersebut dapat diimplementasikan dalam bentuk Tematik Pembangunan untuk membuat tahap-tahap yang jelas, sebagai berikut :

- 1. Tahun 2009 Kota Bima sebagai kota dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan kualitas pelayanan publik yang optimal.
- 2. Tahun 2010 Kota Bima dengan prioritas pembangunan ekonomi berbasiskan perekonomian lokal.
- 3. Tahun 2011 Kota Bima sebagai kota yang sehat dengan fasilitas pelayanan publik yang nyaman.
- 4. Tahun 2012 Kota Bima sebagai kota pendidikan dengan kehidupan yang agamis.

Pada tahun 2009 tematik pembangunan Kota Bima adalah Kota dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Kualitas Pelayanan Publik yang memadai. Tuntutan akan meningkatnya pelayanan publik yang memadai seperti di sektor pendidikan, kesehatan, perijinan harus menjadi prioritas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang selama ini diberikan. Pada tahapan ini pelayanan publik telah dapat memenuhi aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang

baik. Pembenahan manajemen pemerintahan dan pembangunan perlu mendapat prioritas dan perhatian untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.

Pada tahun 2010 tematik Pembangunan Kota Bima adalah Pembangunan Ekonomi yang berbasiskan Perekonomian Lokal. Potensi ekonomi lokal perlu dioptimalkan dalam pembangunan ekonomi Kota Bima. Sektor-sektor unggulan perlu mendapatkan prioritas untuk dapat menggerakkan sektor lainnya.

Pada tahun 2011 tematik Pembangunan Kota Bima adalah Kota yang Sehat dengan Fasilitas Pelayanan Publik yang Nyaman. Kota Bima yang bersih dan sehat melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara optimal sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2012 tematik Pembangunan Kota Bima adalah Kota Bima sebagai Kota Pendidikan dengan Kehidupan Masyarakat yang Agamis. Untuk menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif yang mampu bersaing dalam menghadapi tantangan di berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Kehidupan masyarakat yang agamis dapat menciptakan masyarakat yang bermoral.\*\*\*

## **Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Bima (RTRW Kota Bima Tahun 2011 – 2031)**

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota serta mengatur keseimbangan dan keserasian.

### **Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kota Bima**

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam serta sumber daya buatan guna pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan dan mengacu pada Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung.

Jenis kawasan lindung yang direncanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan Hutan Lindung;
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan bawahannya, yaitu Kawasan Resapan Air;
- 3) Kawasan perlindungan setempat, yaitu: Sempadan pantai, Sempadan sungai, dan Kawasan sekitar mata air;
- 4) Kawasan suaka alam yaitu Kawasan Cagar Budaya;
- 5) Kawasan RTH Kota;
- 6) Kawasan rawan bencana alam, terdiri atas: Kawasan rawan gempa, Kawasan rawan gerakan tanah dan longsor, Kawasan rawan bencana banjir, Kawasan rawan bencana tsunami, dan Kawasan rawan bencana gelombang pasang.

### **Kawasan Hutan Lindung**

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan guna pembangunan berkelanjutan.

Hutan lindung di Kota Bima seluas 323,80 Ha yang terdapat di RTK 25 (Kawasan hutan Maria di kecamatan Rasanae Timur).

Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi:

- a) perencanaan rehabilitasi dan pemulihan hutan yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayu;
- b) membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam;
- c) percepatan rehabilitasi dan pemulihan hutan pada fungsi hutan lindung dengan tanaman endemik dan atau tanaman unggulan lokal sesuai dengan fungsi lindung;
- d) pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan perusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada dan peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman wisata alam laut melalui upaya pencegahan kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran;

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan, antara lain melalui:

- a) kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa; atau budidaya hijauan makanan ternak;
- b) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung melalui kegiatan usaha: pemanfaatan jasa aliran air; pemanfaatan air; wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati; penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
- c) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.



## **Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

Kawasan lindung di Kota Bima dengan kriteria yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air. Penetapan kawasan resapan air dilakukan berdasarkan kriteria kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air dan sebagai pengontrol tata air permukaan.

Rencana pengelolaan kawasan resapan air di Kota Bima dilakukan melalui:

- a) pemberian dukungan terhadap siklus hidrologi dengan mengembangkan tanaman keras atau tahunan yang berfungsi menyimpan air;
- b) pengawasan dan pengendalian kawasan resapan air dengan cara memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- c) pencegahan kegiatan budidaya yang menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat mengganggu fungsi lindung; dan
- d) mengembalikan fungsi sebagai kawasan lindung secara bertahap apabila kawasan resapan air mengalami kerusakan.

Kawasan resapan air di Kota Bima diarahkan pada kawasan perbukitan di Kota Bima yang meliputi kawasan perbukitan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Mata kando, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Panggi, Kelurahan Rontu, Kelurahan Lampe, Kelurahan Dodu, Kelurahan Nungga, Kelurahan Lelamase, Kelurahan Nitu, dan Kelurahan Dara.

## **Kawasan Perlindungan Setempat**

### **1. Kawasan sempadan sungai**

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

Kriteria jalur sempadan sungai adalah:

- Sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
- Sekurang-kurangnya 100 m di kanan kiri sungai besar dan 50 m di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m;
- Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m; dan
- Sekurang-kurangnya 30 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m.

Rencana pengelolaan kawasan sempadan sungai di Kota Bima dilakukan dengan jalan sebagai berikut:

- a) Penguasaan kawasan sempadan sungai oleh pemerintah dengan batas antara 3- 10 meter dan diperkuat statusnya;
- b) Perwujudan lahan-lahan sempadan sungai dapat dilakukan dengan cara partisipatif masyarakat, atau penertiban terutama di kawasan lindung yang membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya;
- c) Pengawasan dan Pengendalian kawasan sempadan sungai yang telah dikuasai oleh pemerintah;
- d) Kawasan sempadan sungai di tanah yang dikuasai oleh masyarakat dapat dilakukan dengan cara penggantian sesuai dengan kesepakatan; dan
- e) Kawasan sempadan sungai yang sudah dikuasai pemerintah, tetapi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka bangunannya dapat dibongkar.

Kegiatan budidaya yang diperbolehkan pada kawasan sempadan sungai di Kota Bima adalah:

- Ruang Terbuka Hijau (RTH), seperti pemakaman, lapangan rumput, lapangan olahraga, dan/atau lahan untuk menjual tanaman hias di ruang terbuka;

- Fasilitas dan pelayanan sosial, seperti tempat ibadah dan/atau pusat informasi wisata;
- Fasilitas dan pelayanan kesehatan, seperti puskesmas;
- Wisata dan rekreasi, seperti rekreasi aktif (taman bermain dan/atau *jogging track*) dan rekreasi pasif (taman).

Kawasan sempadan sungai yang berada di Kota Bima meliputi: sungai Lampe, Sungai Dodu, Sungai Nungga, Sungai Kendo, Sungai Busu, Sungai Jatiwangi, Sungai Romo, Sungai Padolo, dan Sungai Melayu.

## 2. Kawasan Sempadan Pantai

Pada bagian barat Kota Bima berbatasan langsung dengan laut (Teluk Bima). Pantai tersebut membentang dari utara ke selatan. Panjang pantai melalui 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Mpunda, Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat, dan melewati Kelurahan Kolo, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Dara.

Pola Guna Lahan dari kawasan pantai sendiri bervariasi, untuk di kawasan utara dan tengah yang merupakan wilayah administrasi dari Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae Barat sebagian merupakan daerah permukiman perkotaan dan nelayan dengan kondisi lingkungan cenderung kumuh.

Untuk wilayah selatan merupakan pintu gerbang Kota Bima dari arah selatan, umumnya masih belum ada pengembangan, pada kawasan ini terdapat DEPO Pertamina dan PLN, namun apabila tidak diantisipasi maka akan terjadi seperti apa yang saat ini dialami di wilayah pesisir kota. Perlunya ketegasan pemerintah Kota Bima dalam menerapkan kawasan sempadan pantai, agar nantinya tata guna lahan di kawasan pesisir Kota Bima sesuai dengan peruntukannya. Kawasan sempadan pantai sendiri berdasarkan Perda No.11 Tahun 2006 tentang RTRW Propinsi NTB untuk kawasan perkotaan adalah (1) dengan gelombang dari atau sama dengan 2 meter sejauh 30-75 meter dari pasang tertinggi secara proporsional sesuai bentuk, letak dan kondisi fisik pantai, dengan gelombang,(2) dengan tinggi gelombang lebih dari 2 meter lebar sempadan antara 50-100 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat.

Rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai di Kota Bima dilakukan melalui:

- a) Penguasaan kawasan sempadan pantai oleh pemerintah dengan batas antara 10 - 100 meter (sepuluh sampai dengan saratus) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak serta kondisi fisik pantai, dan diperkuat statusnya;
- b) Perwujudan lahan-lahan sempadan pantai dapat dilakukan dengan cara partisipatif masyarakat atau penertiban terutama di kawasan lindung yang membahayakan kelangsungan penduduk yang tinggal di kawasan sekitarnya;
- c) Peningkatan keanekaragaman jenis tanaman dengan tanaman tahunan yang berakar panjang;
- d) Pemanfaatan kawasan sempadan pantai menjadi kegiatan rekreasi yang bersifat publik;
- e) Pengaturan penempatan bangunan-bangunan perlindungan terhadap rawan bencana gempa dan atau gelombang tsunami; dan
- f) Kawasan sempadan pantai yang sudah dikuasai pemerintah, tetapi sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, maka bangunannya dapat dibongkar.

Kegiatan budidaya yang diperbolehkan pada kawasan sempadan pantai adalah:

- Ruang Terbuka Hijau (RTH), seperti lapangan rumput, lapangan olahraga, dan/atau preservasi sumber daya alam;
- Fasilitas dan pelayanan sosial, seperti tempat ibadah dan/atau pusat informasi wisata;
- Fasilitas dan pelayanan kesehatan, seperti puskesmas; dan
- Wisata dan rekreasi, seperti rekreasi pasif (taman) dan rekreasi alam (pantai).

## 3. Kawasan Waduk

Kawasan waduk diarahkan ke seluruh kawasan sekitar waduk yang tersebar di wilayah Kota yang berfungsi sebagai cadangan air pada musim kemarau, dan sekaligus berfungsi untuk pengairan pada kawasan pertanian yang berada di sekitar waduk dan pada areal pertanian di Kota Bima pada umumnya.

Adapun waduk yang berada di wilayah Kota Bima meliputi sekitar Embung Raba, dan DAM Toloweri.

#### **4. Kawasan sekitar mata air**

Kriteria untuk kawasan lindung ini yaitu kawasan di sekitar mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 m. Perlindungan untuk kawasan sekitar mata air dapat dilakukan melalui membangun batas pengaman terhadap mata air dari pencemaran lingkungan serta dengan mempertahankan kelestarian lingkungan dengan penanaman pohon di sekitar mata air. Pemerintah Kota Bima sendiri melalui instansi terkait perlu melakukan monitoring serta sosialisasi kepada masyarakat khususnya penduduk disekitar mata air agar lebih menjaga keberadaan mata air serta membina masyarakat dalam pengelolaan keberadaan mata air.

#### **Kawasan sekitar mata air di Kota Bima meliputi :**

- Mata air Temba Serinci I, Temba Serinci II, Oi Wontu, Temba Ongge, Temba Rombo I, dan Temba Rombo II di kelurahan Rontu;
- Mata air Oi Mbo I dan Oi Mbo II di kelurahan Kumba;
- Mata air Mpangga, Na'a I, dan Na'a II di kelurahan Jatibaru; dan
- Mata air Nungga di Kelurahan Nungga.

Arahan rencana pemanfaatan ruang kawasan mata air adalah untuk konservasi fungsi lindung karena apabila fungsi lindung ini rusak, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan seperti banjir dan erosi sehingga terjadi pendangkalan pada sungai. Program yang dilakukan adalah pencegahan perambahan hutan dan kegiatan budidaya di sepanjang kawasan lindung.

#### **Kawasan Cagar Budaya**

Kawasan cagar budaya merupakan tempat serta ruang di sekitar bangunan yang bernilai budaya dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas berada di Kota Bima, yang mempunyai manfaat tinggi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya ini diharapkan dapat melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keragaman bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Kawasan cagar budaya di Kota Bima adalah seluas 15,35 Ha meliputi:

- 1) Kawasan cagar budaya Istana Kesultanan Bima ( Museum Asi Mbojo ) di Kelurahan Paruga;
- 2) Kawasan cagar budaya Makam Datuk Dibanta Tolobali Kelurahan Sarae; dan
- 3) Kawasan cagar budaya Kompleks Danataraha Kelurahan Dara.

Sedangkan bentuk pengelolaan kawasan cagar budaya di Kota Bima dapat dilakukan melalui cara-cara berikut ini:

- 1) Mempertahankan keberadaannya dan dijaga kelestariannya melalui upaya konservasi bangunan dan lingkungan; dan
- 2) Membangun infrastruktur pendukung di sekitar Kawasan Cagar Budaya yang berfungsi menjaga kelestarian kawasan.

Kegiatan-kegiatan budidaya yang diperbolehkan di sekitar kawasan cagar budaya adalah sebagai berikut:

- Perdagangan skala lokal, seperti warung dan kios;
- Kantor pemerintah, seperti kantor kelurahan;
- Fasilitas dan institusi sosial, seperti tempat ibadah, museum, dan/atau lembaga pelayanan sosial;
- Fasilitas dan pelayanan kesehatan, seperti puskesmas;
- Industri, seperti industri kecil dan/atau industri kerajinan rumah tangga;
- Pelayanan dan jasa kendaraan bermotor, seperti halte; dan
- Wisata, seperti rekreasi aktif (tempat bermain) dan/atau rekreasi pasif (taman).

## Kawasan RTH Kota

### a. Ketentuan Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

1. *Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah*

Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Apabila luas RTH memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau peundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
2. *Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk*

250 jiwa : Taman RT  
2.500 jiwa : Taman RW  
30.000 jiwa : Taman Kelurahan  
120.000 jiwa : Taman Kecamatan/pemukaman  
480.000 jiwa : Taman kota, hutan kota, atau fungsi tertentu.
3. *Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi tertentu*

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, misalnya melindungi kelestarian SDA atau pengamanan pejalan kaki. RTH kategori ini meliputi: RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

### b. Kebutuhan RTH Kota Bima

1. *Kawasan RTH Sempadan Sungai*

Manfaat RTH Kawasan sempadan sungai di Kota Bima adalah untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup, sehingga pada kawasan DAS tersebut perlu adanya tindakan pengendalian dan pengembangan agar tidak mengarah pada pengerusakan ekosistem dan mencegah terjadinya bencana. Usaha yang perlu dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan konservasi sungai tersebut adalah konservasi dalam arti dengan melakukan penghijauan dengan tanaman yang dapat menghindari erosi serta konservasi sungai dalam arti mencegah permukiman untuk berkembang disekitar bantaran sungai dan mengupayakan relokasi permukiman. Tentunya hal ini dapat dilakukan jika ditunjang dengan kesadaran masyarakat yang tinggi, kemampuan pemerintah daerah, tersedianya payung hukum/perda serta kepedulian seluruh komponen masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan kawasan DAS.
2. *Kawasan RTH Sempadan Pantai*

Untuk menjaga keseimbangan lingkungan ekosistem di wilayah pesisir dan laut ditetapkan adanya kawasan sempadan pantai dengan tujuan agar segala bentuk kegiatan yang dilakukan di kawasan pesisir dan laut tidak mengganggu atau merusak kondisi lingkungan dan ekosistem kawasan pesisir dan laut. Kawasan yang telah berkembang saat ini berupa permukiman, nelayan tradisional, kegiatan wisata, permukiman dan sebagainya.  
Kawasan sempadan pantai yang ditetapkan yaitu kawasan sepanjang perairan di wilayah perkotaan Bima yang berbatasan dengan Teluk Bima. Pada kawasan pantai ini jenis kegiatan yang diarahkan dibatasi pada jenis kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung.  
Cara pengelolaan sempadan pantai yaitu memodifikasi sempadan sungai dan pantai yang mempunyai lokasi strategis tanpa harus mengurangi fungsi utama sebagai konservasi serta dalam mendukung Kota Bima sebagai *Water Front City*.
3. *Lingkungan Perumahan*

Pada kawasan perumahan padat dimana ruang untuk RTH sudah tidak tersedia diupayakan penataan RTH dengan menggunakan media pot-pot yang digantung atau pot di media bila masih memungkinkan. Kavling-kavling perumahan yang tidak begitu padat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau seperti untuk taman, ataupun untuk tanaman produktif lainnya.  
Sedangkan pada kawasan perumahan non perkampungan perlu diwujudkan dan dikembangkan taman-taman yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi lingkungan penduduk setempat.

4. *Lingkungan Kavling Bangunan Umum*  
Kavling-kavling kegiatan non perumahan perlu disyaratkan sebagian lahannya untuk ruang terbuka hijau sebagai upaya meningkatkan luasan ruang terbuka hijau kota dan sebagai kawasan resapan air. Seperti pada kawasan industri, perhotelan, perguruan tinggi, serta perkantoran dan lain-lain yang lahannya cukup luas perlu adanya penataan *landscape* dengan tetap menunjukkan adanya ciri kegiatan utama.
5. *Pertamanan Kota*  
Taman-taman kota perlu digalakkan, baik yang mempunyai skala besar maupun taman yang skalanya lebih kecil, sebagai perwujudannya untuk mengarah pada penciptaan *land mark* lingkungan. Pada taman kota ini dapat dimanfaatkan sebagai wisata seperti pada alun-alun kota dapat dikembangkan untuk arena bermain, duduk-duduk santai, hiking, jogging dan lain-lain. Sedangkan taman yang mempunyai skala kecil dapat dimanfaatkan untuk taman biasa yang fungsi dasarnya adalah untuk memperindah kota, sebagai sarana untuk mengatasi masalah polusi udara, suara dan lain-lain.
6. *Kuburan/Makam*  
Kawasan pemakaman juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, sehingga pemanfaatannya perlu ditingkatkan guna menjaga keseimbangan lingkungan yaitu dengan cara penanaman pepohonan yang rindang. Selain itu kawasan pemakaman juga mempunyai peranan yang sangat tinggi sebagai kawasan resapan air.
7. *Lapangan Olah Raga*  
Kawasan olah raga utama yang dikembangkan di Kota Bima yaitu berupa stadion dengan segala perlengkapannya. Dalam pengembangan stadion tersebut tetap harus memperhatikan unsur-unsur kesehatan lingkungan.  
Selain kawasan olah raga utama (stadion) juga terdapat lapangan olah raga skala lingkungan seperti lapangan. Dalam pengembangan kawasan olah raga tersebut juga tidak berbeda jauh dengan pengembangan kawasan olah raga utama (stadion) yaitu tetap memperhatikan kaidah-kaidah atau upaya-upaya kesehatan lingkungan.  
Karena sifatnya sebagai ruang terbuka hijau maka kawasan olah raga ini juga mempunyai fungsi sebagai daerah resapan air.
8. *Pola Tata Hijau Jalur Jalan*  
Rencana jalur hijau yang ditempatkan pada setiap jaringan jalan dan saluran/parit selain memperhatikan konstruksi jalan dan biaya, juga harus memperhatikan kualitas jalan dengan mempertimbangkan faktor estetika, baik lingkungan maupun pemakai jalan. Rencana jalur hijau di sepanjang jalan/saluran dimaksudkan untuk: memberikan kenyamanan bagi pemakai jalan; pengendalian polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan; memberikan pengaruh dan keselamatan bagi pemakai kendaraan yang melaluinya; membantu menurunkan suhu di sekitar ruang jalan, mengurai gas CO di udara, mengurai tekanan air hujan yang jatuh kepermukaan jalan, menekan erosi dan lain sebagainya; kontrol visual, dapat mengurangi sinar matahari, dan sinar lampu pada malam hari; menahan kecepatan angin; serta untuk unsur keindahan/estetika.  
Kriteria kawasan ini disesuaikan dengan standar prasarana kota, besaran, dan/atau lokasi.

Rencana pola pengembangan kawasan lindung setempat yang dapat berfungsi sebagai RTH adalah:

- Menambah jalur hijau di sepanjang jaringan jalan utama yang ada, termasuk jalur hijau jalan kolektor sehingga diperkirakan mencapai luas 2% dari total wilayah Kota Bima;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai, sempadan jalan, taman kota, pemakaman umum; dan

- Menyediakan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat lingkungan perumahan;

Bentuk upaya intensifikasi RTH dapat dilakukan dengan pemilihan jenis tanaman, letak tanaman, ruang antar permukiman, taman-taman rumah. Untuk ekstensifikasi RTH dilakukan dengan pembuatan RTH-RTH baru.

Rencana pengalokasian Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Kota Bima dikontribusi oleh:

- RTH taman RT : 18,59 hektar
- RTH taman RW : 18,59 hektar
- RTH taman Kelurahan : 18,59 hektar
- RTH taman Kecamatan : 19,36 hektar
- RTH taman kota : 187, 2 hektar
- RTH sempadan sungai : 584,53 hektar
- RTH sempadan/median jalan : 127,13 hektar
- RTH sempadan pantai : 250 hektar
- Hutan kota : 1250 hektar
- RTH lapangan : 31, 4 hektar
- TPU : 42,18 hektar
- Jalur Hijau : 58,73 hektar.

\*\*\*

## **Dua Tahun Ny. Hj. Yani Marlina Memimpin TP PKK Kota Bima**

Usai pelantikan H. M. Qurais H. Abidin sebagai Walikota Bima pada tanggal 28 April 2010, digelar pelantikan ketua TP PKK Kota Bima yang kemudian menjadi awal kiprah PKK Kota Bima dibawah kepemimpinan Hj. Yani Marlina H. M. Qurais sampai tahun 2013. Selain meneruskan berbagai program dari TP PKK periode sebelumnya, Hj. Yani Marlina juga telah melaksanakan berbagai program baru.

### **Rapat Evaluasi Program Tahun 2012 dan Pembahasan Rancangan Program Tahun 2011**

Mengawali kinerja tahun 2011, tanggal 7 Januari 2011 (yang selanjutnya dijadikan tanggal untuk pertemuan rutin TP PKK Kota Bima setiap bulannya, dan tanggal 12 sebagai pertemuan gabungan TP PKK Kota, Kecamatan, dan Kelurahan), bertempat di Sekretariat PKK Kota Bima dilakukan rapat evaluasi program kegiatan TP PKK Kota Bima selama tahun 2010 dan membahas rancangan program kegiatan untuk tahun 2011.

### **Sosialisasi Rakernas VII dan Cipta Menu 3B dan Gemar Ikan bersama TP PKK Prov. NTB**

Bersama TP PKK Provinsi NTB, TP PKK Kota Bima juga menggelar Sosialisasi Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2012 bertempat di Lesehan Putri yang dibuka oleh Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, dan Sosialisasi Cipta Menu 3B dan Gemar Ikan yang dihadiri oleh TP PKK Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bima.

### **Pembinaan-pembinaan**

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, setiap TP PKK mulai dari tingkat Kota hingga Kelurahan harus memiliki kompetensi. TP PKK Kota Bima giat melakukan berbagai pembinaan kepada PKK Kecamatan maupun Kelurahan dengan tujuan memberikan motivasi dan mampu menciptakan dan menghidupkan keterampilan bagi rumah tangga dan industri rumah tangga guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi keluarga.

### **Lomba Rancang Busana Tenun dan Batik Khas NTB dan Seminar Perempuan**

PKK Kota Bima giat melakukan kegiatan untuk mempromosikan tenunan khas Bima, serta mengupayakan berbagai langkah terobosan agar tenunan Bima dapat bersaing di pasar regional maupun nasional. Dalam rangka menyambut HUT Kota Bima ke-9, pada tanggal 2 April 2011, PKK Kota Bima bekerjasama dengan Dekranasda NTB menggelar Lomba Rancang Busana Tenun dan Batik NTB Tahun 2011, yang diikuti oleh 76 peserta yang berasal dari Pulau Lombok dan Sumbawa, dan didominasi peserta dari Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

Baru pada tahun 2011 kegiatan ini untuk pertama kalinya diadakan di Pulau Sumbawa dan Kota Bima diberi kepercayaan sebagai tuan rumah. Lomba berlangsung meriah, dengan menghadirkan mantan peragawati Ratih Sanggarwati dan pimpinan redaksi majalah NooR sebagai juri sekaligus sebagai pembicara pada Seminar Perempuan kerjasama PKK Kota Bima dan Dharma Wanita Persatuan Kota Bima yang diadakan pada tanggal 3 April 2011.

### **Lomba Kelurahan Tingkat Kota Bima dan Provinsi NTB**

Lomba Kelurahan selain sebagai momentum evaluasi diri bagi Kelurahan atas program kemasyarakatan, juga bagaimana memanfaatkan kondisi wilayah setempat sehingga dapat dikelola sesuai kebutuhan seperti lingkungan, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kesempatan, dan partisipasi masyarakat.

Lomba Kelurahan bukanlah hal baru, melainkan rutin diselenggarakan setiap tahun dan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Lomba kelurahan dihajatkan untuk mengetahui prestasi yang ada di kelurahan selama satu tahun, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di kelurahan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ada di kelurahan.

### **Lomba-lomba dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK**

Pada tanggal 11 – 13 Juli 2011, TP PKK Kota Bima menggelar lomba tertib administrasi PKK Tingkat Kota Bima yang diikuti 5 kecamatan yang ada di Kota Bima. Selain tertib administrasi PKK, juga diadakan lomba-lomba sebagai berikut:

1. Simulasi KDRT untuk Pokja I;
2. BKB terintegrasi PAUD dan Posyandu dan Kelompok UP2K PKK untuk Pokja II;
3. Merangkai bunga dari bahan limbah untuk Pokja III; dan
4. Posyandu bersaing untuk Pokja IV.

Pencanangan Bhakti Sosial HKG PKK Tahun 2011 dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Ny. Hj. Rabiatul Adawiah H. Zainul Majdi dan jajarannya. Ketua TP PKK Provinsi NTB didampingi Ketua TP PKK Kota Bima melakukan kunjungan pelayanan KB gratis di Puskesmas Asakota.

### **Prestasi-prestasi**

1. Juara I Lomba Rancang Busana Tingkat Provinsi NTB;

Membawa tenunan khas Bima agar dikenal adalah misi TP PKK Kota Bima, di antaranya dengan mengikuti Lomba Rancang Busana Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Tingkat Provinsi NTB. Pada ajang ini Kota Bima mampu meraih prestasi yang membanggakan, yaitu gelar juara I tingkat Provinsi NTB dengan desain sasambo bermotif Garoso yang dirancang oleh Hj. Yani Marlina H. Qurais.

2. Juara III lomba Serba I Kan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2011;
3. Juara III Lomba Posyandu Tingkat Provinsi NTB Tahun 2011;
4. Berpartisipasi dalam Lomba Kota Sehat dan meraih juara I Tahun 2011;
5. Juara II Lomba PHBS tingkat Provinsi NTB Tahun 2011;
6. Juara I Lomba P2WKSS Tingkat Provinsi NTB Tahun 2011;

Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ke-83 yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2011, Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda meraih gelar Juara pertama lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat provinsi NTB. Karena prestasi tersebut, Ibu Lurah Sadia diundang untuk menghadiri peringatan Hari Ibu di istana Presiden di Jakarta.

7. Juara III Lomba Hatinya PKK Tingkat Prov. NTB Tahun 2011;
8. Juara II Lomba Okulasi Tanaman pada Temu Kader Tingkat Provinsi NTB Tahun 2011; dan
9. Juara I Lomba Kadarkum tingkat Provinsi NTB Tahun 2011.

### **Kendala dan Hambatan**

Kendala dan hambatan yang masih dihadapi adalah: (1) masih kurangnya dukungan SDM yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang sistem perencanaan program pembangunan; (2) masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk memperlancar proses analisis dan penyusunan rencana kerja antara lain dukungan ATK, komputer, buku, referensi, mesin fax, dan sebagainya; (3) fungsi dan program PKK belum dipahami secara merata; dan (4) dukungan biaya yang masih kurang dibandingkan dengan program yang dilaksanakan.

### **Harapan untuk Masa Mendatang**

Hj. Yani Marlina berharap, semoga PKK akan lebih profesional, maju, berkembang, dan lebih efektif, dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan pengurus serta mensejahterakan keluarga.

“Kami harapkan pemerintah dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin pelaksanaan gerakan PKK, terutama pada bidang penganggaran”, pungkasnya.\*\*\*



